

**HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESPEKTIF HUKUM
KETATANEGARAAN ISLAM (STUDI KASUS DI KPU GOWA)**



Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

Oleh :

**ISLAMIAH ILYAS
NIM: 10200115100**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ISLAMIAH ILYAS
Nim : 10200115100
Tempat/tgl. Lahir : Sungguminasa, 21 September 1997
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jln. Poros Limbung, Boka (Pajalau)
Judul : **Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam
Pemilihan Umum Prespektif Hukum Ketatanegaraan
Islam (Studi Kasus Di KPU Gowa)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ini duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

ALA UDDIN
M A K A S S A R

Gowa, 6 November 2019

Penyusun

Islamiah Ilyas

Nim: 10200115100

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Prespektif Hukum Ketatanegaraan Islam (Studi Kasus Di KPU Gowa)” yang disusun oleh Islamiah Ilyas, NIM: 10200115100, mahasiswa Jurusan Hukum Tatanegara UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Pada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Tatanegara (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 24 November 2020

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. Muammar Muhammad Bakry Lc., M.Ag

Sekretaris : Dr. Marilang, S.H., M.Hum.

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Sabri Samin, M.Ag

Pembimbing II : Dr. Hj. Halimah B, M.Ag.

Penguji I : Dr. Nila Sastrawati, M.Si.

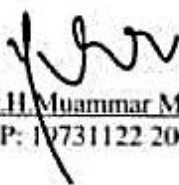
Penguji II : Dr. Hj. Rahmiati, M.Pd.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar,


Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag
NIP: 19731122 200012 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Puji syukur kehadiran Allah swt karna berkat rahmat dan ridho-Nya masih diberikan kesehatan kesempatan untuk dapat menikmati segala yang Allah swt ciptakan dimuka bumi ini. Salam dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw. Nabi yang membawa dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti saat ini.

Alhamdulillah, dengan segala rasa syukur dan berkah dari Allah swt sehingga skripsi yang berjudul “*Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Prespektif Hukum Ketatanegaraan Islam (Studi Kasus di KPU Gowa)*” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Menulis sebuah karya ilmiah itu tidak mudah dan upaya memaksimalkan sudah dilakukan untuk itu diperlukan masukan, saran dan kritikan yang membangun guna untuk kesempurnaan skripsi ini. Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari rintangan yang hadapi, dimulai dari proses penulisan hingga proses pengumpulan data. Namun, dengan segala rasa sabar dan tanggung jawab yang besar sebagai mahasiswa dan bantuan dari berbagai pihak, baik materil dan maupun moril akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Oleh karna itu, dalam kesempatan yang baik ini izinkanlah untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat.

1. Kedua orang tuaku **Ilyas** dan **Suharti** yang telah banyak berkorban waktu, biaya dan dengan segala rasa syukurnya agar dapat menyelesaikan

studi ini dengan sebaik-baiknya dan mampu menerapkan ilmu yang saya dapatkan dengan sebaik-baiknya.

2. Bapak **Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A.,Ph.D**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar periode 2019-2024 dan Bapak **Prof. Dr. H. Musafir Pabbabari, M.Si**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar periode 2015-2019 yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi program sarjana (S1) pada salah satu kampus terbesar di Indonesia Timur ini, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak **Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc.,M.A** selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ibu **Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Ag** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga. Bapak **Dr. Marilang, SH. M.Hum** selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak **Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag** selaku Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan segenap staf pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak **Prof. Dr. H. Sabri Samin, M.Ag** selaku pembimbing yang andil dalam penyelesaian skripsi dan Ibu **Dr. Hj. Halimah B, M.Ag** selaku pembimbing dalam penulisan. Terima kasih kepada bapak dan ibu yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing, memberikan dukungan, nasehat dan motivasi dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
5. Ibu **Dr. Kurniati, S.Ag., M.Hi** selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) periode 2019-2024 dan **Dr. Nila Sastrawati, M.Si** selaku ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan periode 2015-2019, Sekaligus sebagai penguji pertama skripsi, Ibu **Dr. Hj Rahmiati, M.Pd** selaku sekretaris Jurusan Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),

Sekaligus sebagai penguji kedua. serta stafnya atas izin pelayanan, kesempatan dan fasilitas yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. **Queen Nakey** dan **Lizawati** yang telah memberikan motivasi serta doa dan dukungannya agar dapat semangat lagi untuk menulis dan menyelesaikan skripsi ini dan dapat segera menemukan dan mencapai semua yang inginkan.
7. Bapak **Dedy susanto** atas training psikologinya sehingga, akhirnya memutuskan untuk melanjutkan lagi menulis dan menyelesaikan skripsi ini setelah beberapa bulan sempat mengalami gangguan psikosomatik dan terima kasih juga kepada kak **Zhafir Khairan Akalanka** atas syair-syairnya yang begitu dalam yang membuat saya menangis tiada henti setiap mendengarnya, judul syair “melawan diri sendiri dan ajari aku” adalah syair yang membuat sadar kembali dan saya harus kembali melanjutkan hidup.
8. Semua teman-teman seperjuangan saya dikelas **HPK C 015** yang telah membantu memberikan solusi dan informasi dan terima kasih juga atas suka, duka dan bahagia yang kalian berikan untuk mewarnai perjalanan hidup ini.
9. Seluruh **Keluarga, Rekan** dan **Sahabat** serta pihak-pihak yang ikut andil yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selama perjalan studi banyak membantu penyelesaian studi, terutama yang senantiasa memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih yang sebesar besarnya.

Selain itu, permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika pernah menyinggung atau melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak

disengaja, baik dalam bentuk ucapan atau tingkah laku, semenjak penulis menginjakan kaki masuk di Universitas ini hingga selesainya studi. Karena hal itu murni sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan. Adapun mengenal kebaikan-kebaikan, itu semata-mata datangnya dari Allah swt, karena segala kesempurnaan hanyalah milik_Nya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat bernilai ibadah disisi-Nya, Aamiin.

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gowa, 06 November 2019

Penulis

Islamiah Ilyas

Nim: 10200115100

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM PRESPEKTIF HUKUM KETATANEGARAGAAAN ISLAM (STUDI KASUS DI KPU GOWA)	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN TEORETIS	14
A. Pengertian Hak Politik.....	14
B. Perbedaan Hak dan Kewajiban.....	15
C. Macam-Macam Hak	15
D. Pengertian Disabilitas Mental.....	16
E. Ciri-Ciri Penyandang Disabilitas Mental	17
F. Kategori Penyandang Disabilitas Mental	
G. Pengertian Pemilihan Umum dan Syarat-Syarat Pemilu.....	19
H. Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilihan Umum	
I. Pengertian Hukum Tatanegara Islam	23
J. Pandangan Hukum Tata Negara Islam Tentang Disabilitas Mental.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	34
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	34

B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Sumber Data	35
D. Metode Pengumpulan Data	35
E. Instrumen Penelitian	36
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	36
G. Pengujian Keabsahan Data	37
BAB IV HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM PRESPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM (STUDI KASUS DI KPU GOWA).....	38
.....	38
A. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Di KPU Gowa.....	46
B. Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Di KPU Gowa.....	58
C. Pandangan Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Di Kabupaten Gowa	61
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Implikasi Peneliti.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
RIWAYAT HIDUP	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72
PEDOMAN WAWANCARA.....	77

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

4. Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.=

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).



ABSTRAK

Nama : ISLAMIAH ILYAS
Nim : 10200115100
Judul : Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Prespektif Hukum Ketatanegaraan Islam (Studi Kasus di KPU Gowa)

Pokok masalah skripsi ini adalah bagaimana pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum prespektif hukum ketatanegaraan islam di KPU Gowa dan sub masalahnya yakni: 1). Bagaimana pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental di KPU Gowa 2). Bagaimana partisipasi penyandang disabilitas mental di KPU Gowa 3). Bagaimana pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental di Kab.Gowa

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), deskriptif kualitatif pendekatan yang digunakan yakni pendekatan yuridis normatif dan syar'i. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa wawancara dan sumber data sekunder berupa buku, jurnal, dan data di internet yang berkaitan dengan penelitian. Data di kumpul melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Instrumen yang digunakan yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara, alat tulis, kamera, dan alat perekam. Pengolahan data dan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pemenuhan hak politik yang didapatkan oleh penyandang disabilitas mental dari Komisi Pemilihan Umum Kab.Gowa adalah hak pilih. Hak pilih diberikan kepada penyandang disabilitas mental yang pada saat pendataan dalam keadaan stabil. 2) Partisipasi politik penyandang disabilitas mental di kabupaten gowa adalah hak untuk ikut berpartisipasi dalam semua rangkaian proses demokrasi. Penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang sama baik itu disabilitas fisik, mental dan intelektual. 3) Pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas di kabupaten gowa masih belum menunjukan keadaan yang baik. Sosialisasi kesehatan mental belum dilakukan dengan baik sehingga masih banyak warga di kabupaten gowa belum tereduksi pentingnya kesehatan mental.

Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan kepada pemerintah 1) Memberikan kesempatan dan berlaku adil kepada seluruh rakyat Indonesia sehingga tidak ada lagi warga negara yang tidak diberikan haknya oleh negara. 2) memberikan kesempatan kepada semua penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi secara penuh pada pemilihan umum 3) memberikan informasi melalui sosialisasi atau pembentukan tim sigap untuk menangani masalah kejiwaan sehingga semua warga negara Indonesia tereduksi dengan baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 yang memiliki makna bahwa segala peraturan dan perbuatan yang diatur oleh negara Indonesia haruslah berlandaskan oleh Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga merupakan sumber hukum pertama yang berlaku dinegara indonesia.

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan, yang dimana rakyat dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden, Wakil Rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui pemilihan umum. Semua aspirasi dan kebijakan rakyat kemudian diterima dan dilaksanakan dan dikelola oleh pejabat-pejabat pemerintah yang terpilih.

Demokrasi dapat didefinisikan sebagai system pemerintahan negara yang diupayakan untuk mencapai suatu kedaulatan rakyat. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang terbagi menjadi tiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) yang diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Dalam suatu negara, demokrasi dan politik itu selalu berjalan bersama. Dimana politik mencakup semua unsur yang dibutuhkan oleh negara, dalam memilih seorang pemimpin negara atau pejabat pemerintahan itu tidak bisa lepas

dari proses politik yang dilakukan sehingga terjadi proses demokrasi dimana rakyat memilih pemimpinnya melalui pemungutan suara yang sah dan terstruktur yang dilakukan lembaga berwenang yaitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut system pemerintahan demokrasi sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa “*kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang*”. Jadi, Konsep kedaulatan di Republik Indonesia tidak berdasarkan pada kedaulatan agama, raja, maupun negara. yang jika hal ini ditinjau secara konstitusi walaupun secara benar pada akhirnya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius¹

Dalam sejarah Indonesia, demokrasi dimulai setelah tumbanganya Soeharto sebagai kepala negara berkat desakan mahasiswa yang turun kejalan untuk mengeluarkan segala aspirasi mereka dan keluhan mereka terhadap hilangnya kebebasan dalam berargumen. Desakan tersebut menyebabkan turunnya Soeharto dalam singasana kekuasaannya. Era tersebut menjadi awal tumbanganya era orde baru dan berpindah ke era reformasi yang menjadi angin segar dalam perpolitikan Indonesia. Era Reformasi membawa pengaruh yang sangat besar dalam hal pemerintahan, dimana kebebasan berargumen dan kebebasan bersuara dalam menentukan pilihan ini mampu diwujudkan dalam pemerintahan Indonesia yang demokratis.

Hasil dari desakan tersebut juga menghasilkan tatanan baru dalam hal pemilihan umum. Pemilihan umum menjadi sarana penting untuk memilih pemimpin sesuai dengan keinginan setiap masing-masing warga negara Indonesia

¹Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 189.

dan juga merupakan sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk membentuk suatu kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat.

Pemilihan umum adalah pranata yang terpenting dalam tiap negara demokrasi. Pranata ini berfungsi untuk memenuhi prinsip pokok demokrasi yaitu, kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur. ketiga prinsip ini bertujuan untuk menjamin terjaganya dan terlaksananya cita-cita kemerdekaan, mencegah bercokolnya kepentingan tertentu didalam tubuh pemerintahan.²

Pemilihan umum adalah kegiatan yang paling penting dalam proses demokrasi, dimana setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memilih pemimpinnya. selama masih berstatus sebagai warga negara indonesia maupun bertempat tinggal diluar negeri selama masih berstatus warga negara Indonesia maka, mempunyai hak yang sama dalam pemilihan umum. Pemilihan umum juga merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh suara langsung dari rakyat yang bersifat umum, bebas, rahasia, adil dan jujur.

Indonesia merupakan negara keempat dengan jumlah penduduk terbanyak didunia. Berdasarkan survey *Wordlometers*, indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 269 juta jiwa atau 3,49% dari total populasi didunia³. dari banyaknya jumlah penduduk diindonesia tidak menjadikan indonesia sebagai negara dengan kualitas kesehatan jiwa yang baik.

Kesehatan jiwa yang buruk mengakibatkan banyaknya masyarakat yang mengalami gangguan emosional. Gangguan tersebut mengakibatkan kualitas hidup

²Tim Peneliti Sistem Pemilu, *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Sebuah Laporan Penelitian* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), h.2

³Dwi hadya jayani <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia>. (Diakses pada tanggal 17 juli 2019)

yang buruk dan penurunan kualitas sumber daya manusia baik itu dari segi intelektual maupun dari segi sosial masyarakat. Kesehatan jiwa yang buruk itu dapat digolongkan menjadi gangguan kejiwaan atau disabilitas mental.

Penderita gangguan kejiwaan atau disabilitas mental di Indonesia cukup tinggi. Ada banyak faktor yang mengakibatkan seseorang mengalami gangguan psikologis. Di beberapa kota besar di Indonesia tingkat persaingan hidup di kota-kota besar sangat tinggi, faktor tuntutan ekonomi, permasalahan keluarga, kurangnya sosialisasi dan kurangnya waktu untuk liburan mengakibatkan pertumbuhan penyakit mental semakin tinggi. Semakin tingginya penderita gangguan kejiwaan ini tidak dibarengi dengan kebijakan pemerintah tentang sosialisasi penyembuhan permasalahan kejiwaan untuk mencegahnya semakin tingginya angka masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan atau mental.

Dalam Islam, penderita gangguan jiwa dikenal sebagai penyakit hati. Dimana penderita penyakit tersebut dianggap sebagai manusia yang memiliki sifat-sifat tercela seperti mudah marah, dengki, iri hati dan sering berprasangka buruk kepada sesama manusia. Penyakit tersebut membuat para penderitanya menjadi manusia yang kurang bersyukur dan sangat jauh dari rahmat Allah swt. Sehingga banyak hak dan kewajiban penderita penyakit gangguan jiwa tidak dilaksanakan dikarenakan penderita sulit bergaul dengan manusia lainnya.

Penderita penyakit mental erat kaitannya dengan stigma “Orang gila” yang menyebabkan banyak masyarakat melakukan (*judge*) terhadap orang yang mengalami hal tersebut. Gangguan jiwa lebih mudah dikenali dengan stigma yang buruk dan stereotip yang tidak menguntungkan penderitanya. Gangguan jenis ini merupakan jenis penyakit yang menunjukkan penyimpangan atau abnormalitas pada pola perilaku yang jika sudah di *labeling* maka, akansangat sulit mendapatkan hak-hak dasarnya. Hak dasar untuk mendapatkan pekerjaan

pun akan sangat sulit didapatkan oleh penderita penyakit tersebut karena dianggap tidak layak berada ditengah-tengah masyarakat yang menganggap dirinya “Normal”.

Salah satu hak penderita gangguan kejiwaan yang sedang diperdebatkan di Indonesia adalah hak politik penderita gangguan kejiwaan. Penderita gangguan kejiwaan ini terancam tercabut haknya karena dianggap tidak cakap hukum dalam mengikuti proses perpolitikan di Indonesia. Hak politik yang seharusnya diberikan kepada setiap warga negara Indonesia selama masih berkewarganegaraan Indonesia dibatasi karena beberapa hal. Salah satu hal yang dibatasi adalah oleh negara adalah hak politik dan hak partisipasi politik penyandang disabilitas mental. Hak konsitusioanal warga negara indonesia wajib diberikan kepada setiap warga negara Indonesia dan itu sesuai dengan aturan UU No.19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons With Disabilities*) dan UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabiitas. Berdasarkan rujukan tersebut, sudah seharusnya penyandang disabilitas baik fisik maupun mental mendapatkan hak yang sama dalam mengikuti pesta demokrasi yaitu pemilihan umum dan dimasukkan kedalam daftar pemilih agar nantinya mampu memberikan hak suaranya untuk kemajuan negara Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Covention on the Rights of Persons with Disabilities*) yang memiliki tujuan untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*) yang merupakan kewajiban negara untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi tersebut. Hak-hak penyandang

disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integrasi mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian serta dalam keadaan darurat.⁴

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak-hak sebagai berikut : Hak hidup, hak bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsensi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan warga negara, bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.⁵

Beberapa kendala dalam pemberian hak politik penyandang disabilitas mental dalam mengikuti partisipasi politik adalah penderita disabilitas mental dianggap tidak cakap hukum sehingga mengalami kendala dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum. Penyandang disabilitas mental di kabupaten Gowa diberikan hak politiknya melalui beberapa syarat serta pendampingan khusus agar penyandang disabilitas mental dapat menggunakan haknya tanpa harus menunggu lama, beberapa kendala lain seperti penyakit mental ini bersifat kambuhan sehingga perlu pemberitahuan khusus agar penderita penyakit mental ini ingin datang untuk berpartisipasi ke tempat pemugutan suara (TPS).

⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the rights of persons with disabilities)*

⁵Republik Indonesia, Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang *Penyandang Disabilitas*

Pada pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU No.11 Tahun 2018 yang berbunyi : “Pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b) sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter”. Peraturan tersebut sudah dihapus oleh KPU dan sedang dalam peninjauan.⁶

Berdasarkan peninjauan dan pemaparan latar belakang masalah diatas. Maka, dari itu perlu diadakan penelitian tentang hak politik penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum perspektif hukum ketatanegaraan Islam.

Dengan demikian, Peneliti mencoba mengkaji dan melakukan penelitian yang berjudul : **“Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam (Studi Kasus Di Kpu Gowa)”** .

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

- a. Hak Politik
- b. Penyandang Disabilitas Mental
- c. Pemilihan Umum
- d. Hukum Ketatanegaraan Islam

2. Deskripsi Fokus

a. Hak Politik

Hak Politik adalah hak ikut serta dalam pemerintahan atau dengan kata lain sebagai hak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilu dan hak dalam mendirikan partai politik.

⁶Raden trimutia hatta. <https://www.liputan6.com/news/read/3937177/headline-kontroversi-3500-pemilih-dengan-gangguan-jiwa-di-pemilu-2019-aturannya>. (Diakses pada tanggal 22 juli 2019)

b. Penyandang Disabilitas Mental

Penyandang disabilitas mental adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa yang dalam jangka waktu lama mengalami hambatan dalam interaksi dan partisipasi di masyarakat berdasarkan kesetaraan lainnya. Orang dengan gangguan kejiwaan tersebut mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan kejiwaan. Adapun yang disebut dengan ODGJ adalah Orang yang mengalami gangguan perilaku, pikiran, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.⁷

c. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan Umum adalah pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rakyat). Dalam UU No.8 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1) pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

d. Hukum Ketatanegaraan Islam

Hukum ketatanegaraan yang dalam prakteknya membahas mengenai tata negara, bentuk negara, unsur negara dll. Sedangkan, Hukum Ketatanegaraan Islam adalah hukum yang membahas tentang ketatanegaraan Islam dan segala bentuk negara yang berhubungan dengan keislaman.

⁷Mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental (Diakses Pada Tanggal 22 Juli 2019)

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
Hak Politik	Hak Politik adalah hak ikut serta dalam pemerintahan atau dengan kata lain sebagai hak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilu dan hak dalam mendirikan partai politik
Penyandang Disabilitas Mental	<p>Penyandang disabilitas mental adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa yang dalam jangka waktu lama mengalami hambatan dalam interaksi dan partisipasi di masyarakat berdasarkan kesetaraan lainnya. Orang dengan gangguan kejiwaan tersebut mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan kejiwaan. Adapun yang disebut dengan ODGJ adalah Orang yang mengalami gangguan perilaku, pikiran, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi</p>

	sebagai manusia. ⁸
Pemilihan Umum	Pemilihan Umum adalah pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rakyat). Dalam UU No.8 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1) pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Hukum Ketatanegaraan Islam	Hukum ketatanegaraan yang dalam prakteknya membahas mengenai tata negara, bentuk negara, unsur negara dll. Sedangkan, Hukum Ketatanegaraan Islam adalah hukum yang membahas tentang ketatanegaraan Islam dan segala bentuk negara yang berhubungan dengan keislaman.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan pokok masalah yakni bagaimana hak politik penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum prespektif hukum ketatanegaraan Islam (Studi kasus di KPU

⁸Mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental (Diakses Pada Tanggal 22 Juli 2019)

Gowa) selanjutnya pokok masalah tersebut dirincikan beberapa sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di KPU Gowa?
2. Bagaimana Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam pemilihan umum di KPU Gowa?
3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental di kabupaten Gowa?

D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan ini, dibutuhkan berbagai dukungan referensi, teori, artikel dari beberapa sumber yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian mengenai karya-karya tulis ilmiah dan artikel berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis antara lain :

1. Fajlurrahman Jurdi dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Pemilihan Umum (Cet. I, Tahun 2018)*. Dalam buku ini menjelaskan tentang dasar-dasar serta pengertian pemilihan umum di Indonesia, buku ini juga menjelaskan mengenai beberapa sistem pemilihan umum dinegara lain dan beberapa pendapat dari beberapa ahli. Peneliti akan membahas mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas mental dalam mengikuti partisipasi politik pada pemilihan umum.
2. Tim Peneliti Sistem Pemilu, *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Sebuah Laporan Penelitian*. Dalam buku ini menjelaskan mengenai bagaimana sistem pemilihan umum yang terjadi di Indonesia, laporan-laporan penelitian yang dikaji lapangan dan dijadikan dalam satu buku. Peneliti

akan membahas mengenai partisipasi politik yang didapatkan oleh penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum.

3. Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*. Dalam buku ini menjelaskan tentang psikologi yang ada dalam dunia kesehatan. Peneliti akan membahas beberapa karakteristik dan ciri-ciri penyandang disabilitas mental yang merupakan penyakit psikologis dalam dunia kesehatan yang disebut dengan gangguan kejiwaan atau disabilitas mental.
4. Mulyadi, *Konsep dasar kesehatan mental*. Dalam buku ini menjelaskan tentang kesehatan mental yang sehat menurut badan kesehatan dunia (WHO). Peneliti akan membahas mengenai ciri-ciri dan kategori disabilitas mental yang ringan serta berat yang menjadi pertimbangan KPU untuk memasukan kedalam daftar pemilih tetap.
5. Zainuddin H Dalam jurnal ilmiah *Terapi Jiwa Menurut Islam* vol.1 no.1. 2014. Dalam jurnal ini membahas mengenai kesehatan mental dalam Islam dan juga berbagai macam penyakit-penyakit hati dalam prespektif Islam. Peneliti akan membahas mengenai pandangan masyarakat terhadap penyakit-penyakit hati yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan kejiwaan akibat pengaruh buruk yang terjadi dilingkungan masyarakat.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di KPU Gowa?
- b. Untuk mengetahui partisipasi politik penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di KPU Gowa ?

- c. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental di kabupaten Gowa?

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Secara teoritis diharapkan skripsi ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan terkait mengenai hak-hak politik penyandang disabilitas mental.

b. Kegunaan Praktisi

Memberikan informasi dan pengetahuan tentang hak asasi manusia terkhusus penyandang disabilitas mental yang sudah dilindungi oleh negara melalui pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh hak politik. menjadi salah bentuk kontribusi pemikiran dalam dunia pendidikan, politik dan kesehatan.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Pengertian Hak Politik*

Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Dalam kamus bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu, derajat atau martabat.⁹

Hak Politik (Politik Rights) adalah hak ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih yang dimaksudkan adalah hak untuk dipilih. Contohnya adalah mencalonkan sebagai Bupati dan memilih dalam suatu pemilu hak untuk dirikan partai politik juga termasuk dalam hak asasi politik. Hak asasi politik juga termasuk dalam hak memilih dalam suatu pemerintahan.¹⁰

Hak Asasi Politik juga merupakan salah satu hak dasar warga negara di negara-negara demokrasi dan pelaksanaan hak ini dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada warga negara untuk *meng-engage* diri dalam pemerintahan. Keterlibatan dalam pemerintahan ini dapat dilakukan baik didalam maupun diluar birokrasi pemerintahan. Dengan pemilu, setiap warga negara yang memenuhi persyaratan undang-undang dapat dipilih dan memilih. Memilih dan dipilih merupakan hak politik warga negara yang dijamin konsitusi dan undang-undang¹¹

Penegasan yang dikalah pentingnya adalah mengenai hak asasi politik yang ditermaktub dalam pasal 25 *Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan*

⁹Wikipedia.org/wiki/hak (Di akses pada tanggal 18 september 2019)

¹⁰Dr. Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2016) h.165

¹¹Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Cet.1, Jakarta: Kencana, 2018) h.99

Politik yang menegaskan bahwa setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan tanpa pembedaan apa pun tanpa pembatasan yang tidak layak untuk :

1. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
2. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama. Serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan.
3. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.¹²

B. Perbedaan Hak dan Kewajiban

Perbedaan antara hak dan kewajiban yang paling mencolok adalah hak yang bersifat “mendapatkan atau memperoleh” sedangkan kewajiban mengacu kepada tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat.

Hak asasi manusia yang paling mendasar dan dimiliki oleh manusia sejak lahir dan dalam kandungan adalah hak hidup, hak atas persamaan, hak atas kesejahteraan, hak atas pendidikan, hak untuk bekerja dan masih banyak lagi hak-hak lainnya yang wajib diberikan kepada semua manusia yang ada di bumi.

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan yang bisa berakibat hukum kewajiban moral dan kewajiban atas suatu tanggung jawab yang telah memiliki hukum seperti kewajiban mahasiswa untuk mengikuti seluruh peraturan yang berlaku dalam lingkup universitas.

C. Macam-Macam Hak

Konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik (*International Covenant On Civil and Political Rights*) yang merupakan perjanjian multilateral

¹²Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Cet.1, Jakarta: Kencana 2018) h.99

yang telah ditetapkan oleh majelis umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang wajib dilakukan oleh para anggota perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang berisi tentang melindungi segenap hak-hak kemanusiaan seperti hak hidup, hak kebebasan beragama, hak politik, hak kebebasan berpendapat, hak bebas berkumpul, hak elektoral dan hak untuk memperoleh proses pengadilan yang adil dan tidak berpihak. Perjanjian tersebut merupakan bagian dari piagam hak asasi manusia internasional bersama dengan kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan juga deklarasi hak asasi manusia universal.¹³

D. Pengertian Disabilitas Mental

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami keterhambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dan aktif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas mental adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa yang dalam jangka waktu lama mengalami hambatan dalam interaksi dan partisipasi di masyarakat berdasarkan kesetaraan lainnya. Orang dengan gangguan kejiwaan tersebut mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan kejiwaan. Adapun yang disebut dengan ODGJ adalah Orang yang mengalami gangguan perilaku, pikiran, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.

¹³*International Covenant On Civil and Political Rights Office The United Nations High Commissioners Of Human Rights* (Diakses pada tanggal 26 september 2019)

Menurut kartini kartono (1989) yang disebut dengan gangguan mental adalah bentuk gangguan dan kekacauan fungsi mental atau kesehatan mental yang disebabkan oleh kegagalan mereaksinya mekanisme adaptasi dari fungsi kejiwaan terhadap stimulus ekstren dan ketegangan-ketegangan sehingga muncul gangguan fungsi atau gangguan struktur dari satu bagian, satu organ, atau sistem kejiwaan/mental.

Penyakit jiwa (*Psychoses*) adalah kelainan kepribadian yang ditandai oleh mental dalam dan gangguan emosional yang mengubah individu normal menjadi tidak mampu mengatur dirinya untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat. Kedua istilah ini dapat identifikasi menjadi *psychoses insanity* dan *demensia*. *Insanity* merupakan istilah resmi yang menunjukkan bahwa individu itu juga kacau dan gila akibat tindakannya. Sedangkan *demensia* digunakan untuk kebanyakan kelainan mental tetapi secara umum dikenal sebagai kekacauan mental (Mental disorder) yang lebih menyolok dari *insanity*.

Undang-Undang Kesehatan Jiwa No.18 Tahun 2014, menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan gangguan pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam sebuah gangguan jiwa ini dapat diderita oleh siapapun dan kapanpun dan dimanapun berada sehingga dapat menjadi beban kepada si penderita dan keluarga penderita jika tidak ditangani dengan cepat.

E. Ciri-Ciri Penyandang Disabilitas Mental

Disabilitas merupakan istilah yang meliputi gangguan keterbatasan aktivitas dan pembatasan partisipasi. Gangguan merupakan masalah pada fungsi tubuh dan strukturnya yang merupakan batasan dalam melakukan kegiatan yang dihadapi oleh individu yang mengalami hal tersebut. Sedangkan, pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Jadi, disabilitas merupakan sebuah fenomena kompleks

yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal.

Kartini Kartono (1999) dalam bukunya Patologi Sosial Jilid I, cetakan ke-6 menyebutkan bahwa penderita gangguan mental banyak dijumpai di beberapa tempat dengan beberapa karakteristik seperti :

- a) Kota-kota besar : Penderita gangguan mental lebih banyak di kota besar dibanding di desa yang disebabkan oleh kebingungan, rendah diri, penolakan masyarakat, dan merasa terancam bahaya sehingga timbul rasa tidak dikenal, terisolasi, cemas dan takut, perasaan dikejar-kejar. Akibatnya, timbul disorganisasi, disosiasi, dan disintegrasi diri.
- b) Orang dewasa dan usia lanjut : Disebabkan oleh faktor sosial budaya. Akibatnya, timbul perasaan isolasi sosial, kehilangan harga diri, perasaan tidak dihargai, dan perasaan kurang percaya diri.
- c) Anak Remaja, terutama masa puber : Disebabkan oleh mentalnya yang masih rapuh karena tidak kuat dengan adanya tekanan dari luar. Akibatnya, mudah mengalami gangguan mental dan mudah patah semangat.
- d) Kalangan Dinas Militer : Disebabkan ketidakmampuan beradaptasi dengan suasana baru, suasana otoriter, suasana disiplin dengan ketat, atau kejenuhan tugas yang terlalu lama, ketahanan fisik yang semakin menurun. Akibatnya, timbul komunikasi yang terputus, rasa ketakutan, rasa bersalah, rasa rendah diri.
- e) Orang yang status ekonominya sangat minim : Disebabkan tuntutan sosial tinggi dan ambisi material yang tinggi. Akibatnya, timbul tekanan jiwa, stress dan frustrasi.

f) Wanita : Lebih banyak dirawat di rumah sakit karena mengalami gangguan jiwa dan mengalami psikosomatis dibanding pria.

g) Keluarga yang broken home dan radikal ¹⁴

Dalam klasifikasi penyandang disabilitas mental yang merupakan kelemahan dari penyandang disabilitas mental adalah sukar mengendalikan emosi pribadi dan emosi sosial, cacat pikiran, lemah daya tangkap dan penderita cacat dari suatu kecacatan. Sedangkan, gangguan jiwa berat seperti skizofrenia merupakan gangguan berat yang berisiko melakukan tindakan kekerasan akibat gejalanya seperti halusinasi berat hingga gangguan kecemasan berlebih. Skizofrenia merupakan penyakit psikotik yang memiliki sifat kambuhan dan proses penyembuhan yang sangat lama. Skizofrenia dapat terlihat jelas oleh mata saat penyakit tersebut kambuh seperti gangguan perasaan, gangguan perilaku, gangguan persepsi, gangguan pikiran, dan gangguan motivasi dan neurokognitif. Sedangkan, gangguan jiwa biasa seperti depresi ringan, stress yang dapat sembuh dengan mengikuti proses terapi oleh psikiater yang tidak membutuhkan waktu yang lama. Ciri-ciri pengidap depresi seperti melukai diri sendiri, memukul atau mengumpat yang merupakan gejala-gejala yang dapat terlihat oleh mata masyarakat.¹⁵

F. Kategori Penyandang Disabilitas Mental

Disabilitas mental merupakan gangguan kesehatan atau gangguan jiwa yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti penyakit fisik kronis yang dapat mempengaruhi otak oleh peyalahgunaan napza. Faktor psikologis seperti pola adaptasi yang merupakan pola penyelesaian masalah dan pertahanan diri dan kepribadian, faktor sosial spiritual seperti pola relaksasi, sistem dukungan, situasi

¹⁴Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2004) h. 252-257.

¹⁵Mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental. (Diakses pada tanggal 26 september 2019)

khusus atau kritis, tugas-tugas sekolah atau tugas kuliah yang membuat spiritual melemah karena tekanan yang terlalu banyak.

Berikut kategori gangguan jiwa yang diklasifikasikan menjadi beberapa jenis:

1. Kategori ringan

a) Gangguan kecemasan

Gangguan ini ditandai dengan perasaan ketakutan, panik, berkeringat dan detak jantung menjadi lebih cepat. Gangguan ini diakibatkan oleh phobia terhadap situasi tertentu. Gangguan kecemasan sosial atau serangan panik berlebih.

b) Gangguan kepribadian

Gangguan ini ditandai dengan perubahan karakter yang *extreme* dan kaku yang cenderung tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat seperti antisosial dan paranoid.

c) Gangguan mood

Gangguan ini ditandai dengan perubahan mood atau perasaan secara cepat dan *extreme* seperti perasaan sedih terus menerus, bahagia yang terlalu over atau merasa terlalu bergembira selama periode tertentu atau memiliki perasaan sangat senang dan sangat sedih terus menerus yang bergantian secara fluktuatif. Bentuk gangguan ini seperti bipolar dan depresi.

d) Gangguan ketidakmampuan mengontrol keinginan

Gangguan ini ditandai dengan keadaan yang tidak dapat menolak dorongan dari dalam dirinya untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya membahayakan diri sendiri atau orang lain. Gangguan jenis ini antara lain adalah kleptomania.

e) Gangguan pola makan

Gangguan ini ditandai dengan penderitanya mengalami penurunan signifikan dalam menjaga pola makan yang menyebabkan penderitanya mengalami anoreksia (kekurangan gizi), bulimia nervosa yang dimana penderitanya selalu memuntahkan makanan yang masuk kedalam tubuhnya dengan sengaja.

f) Gangguan obsesif-kompulsif (*obsessive compulsive disorder*)

Gangguan ini ditandai dengan rasa ketakutan terus menerus dengan pikiran yang mengganggu yang disebut obsesif, kondisi ini dilakukan secara terus menerus seperti mencuci tangan karena takut berlebihan terhadap kuman yang disebut kompulsif.

2. Kategori berat

a) Gangguan pasca trauma (*Post Traumatic Stress Disorder*)

Gangguan ini ditandai dengan seseorang yang mengalami kejadian yang traumatis seperti kematian anggota keluarga yang dicintai secara tiba-tiba, pelecehan seksual dan bencana alam.

b) Gangguan respons stress atau gangguan penyelesaian

Gangguan ini ditandai dengan seseorang yang menjadi sangat emosional dan mengalami perubahan perilaku setelah berada pada kondisi dibawah tekanan seperti kondisi krisis, perceraian, bencana alam, kehilangan pekerjaan.

c) Gangguan disosiatif

Gangguan ini ditandai dengan gangguan parah pada identitas ingatan dan kesadaran diri sendiri dan lingkungannya. Gangguan ini disebut dengan gangguan kepribadian ganda (*alter ego*).

d) Gangguan seksual dan gender

Gangguan ini ditandai dengan gairah dan perilaku seksual seperti pedofilia atau gangguan identitas gender.

e) Gangguan alzheimer (Demensia)

Gangguan ini dimasukkan kedalam kategori sangat berat karna berhubungan dengan gangguan otak serta proses penyembuhan yang memerlukan waktu sangat lama dan tidak dapat sembuh dengan sendirinya.

f) Gangguan skizofrenia

Gangguan ini juga masuk kedalam gangguan sangat berat yang terjadi dalam jangka waktu lama dan menyerang otak yang mengakibatkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi, dan wahan, kekacauan berfikir dari perubahan tertentu. Gejala ini juga bisa disebut gejala psikosis yaitu kondisi dimana penderitannya kesulitan membedakan antara kenyataan dan imajinasi yang dibuat sendiri.¹⁶

Data Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15 tahun keatas mencapai sekitar 14 juta orang atau 6% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan, prevalensi gangguan jiwa berat seperti skizofrenia mencapai sekitar 500.00 orang atau sebanyak 1,8 per 1000 penduduk.¹⁷

Indonesia ditahun 2019 merupakan negara dengan tingkat stress terrendah dibanding negara lain. Menurut hasil survei Perusahaan Cigna dalam bidang

¹⁶<https://www.alodokter.com/sakit-jiwa-ternyata-ada-banyak> (Diakses pada tanggal 2 oktober 2019)

¹⁷<http://www.depkes.go.id/article/print/161000700005/peran-keluarga-dukung-kesehatan-jiwa-masyarakat.html> (Diakses pada tanggal 22 juli 2019)

penyediaan solusi keuangan yang bergerak dibidang asuransi kesehatan mengungkapkan bahwa di Indonesia dari 1.000 orang responden yang telah disurvei dinegara indonesia hanya mendapatkan 75% responden yang mengalami masalah stress. Angka tersebut lebih kecil dari semua negara yang pernah melakukan survei dan mencapai angka 86% dalam masalah stress. Sementara itu, responden dari Indonesia sebanyak 25% mengatakan bahwa masyarakat Indonesia mampu menyelesaikan masalahnya kepada keluarga dan teman sehingga tingkat stres warga negara Indonesia sangat rendah.

Jika ditinjau dari segi kesehatan jiwa. Indonesia masuk dalam jajaran kategori negara dengan tingkat gangguan mental tinggi. Terbukti dengan adanya 3500 jiwa yang masuk dalam daftar pemilu yang berhak menggunakan hak pilihnya di pemilihan umum tahun 2019. Dilihat secara filosofis, gangguan jiwa atau disabilitas mental mempunyai hak yang sama seperti manusia normal lainnya, memiliki hak asasi manusia yang wajib diberikan kepada mereka yang sedang mengalami masalah psikologis. Salah satu hak yang diberikan adalah hak politik.

G. Pengertian Pemilihan Umum dan Syarat-Syarat Pemilu

Pemilihan Umum adalah pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rakyat). Dalam UU No.8 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1) pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemilih agar dapat ikut serta dalam pemilihan umum adalah :

1. Warga negara Indonesia
2. Warga yang telah genap berusia tujuh belas tahun

3. Terdaftar sebagai pemilih di DPT
4. Tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya
5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap
6. Seorang purnawirawan TNI.

H. Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilihan Umum

Salah satu bentuk dari partisipasi adalah partisipasi politik. Partisipasi politik dapat dirasakan oleh semua warga Negara Indonesia termasuk penyandang disabilitas mental. Disabilitas mental adalah mereka yang mengalami gangguan atau masalah pada fungsi tubuh dan strukturnya yang menyebabkan penderitanya mengalami pembatasan kegiatan atau kesulitan dalam melaksanakan tugas dan tindakannya. Pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Partisipasi juga merupakan hak yang dapat digunakan oleh setiap warga negara dalam memperoleh haknya seperti hak politik.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan, *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai, dan gerakan sosial dengan *direct action*nya¹⁸.

¹⁸Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) h. 367-368

Dibeberapa negara termasuk di Indonesia konsep partisipasi politik berdasarkan pada kedaulatan rakyat yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan bangsa dan masyarakat. Jadi, partisipasi politik adalah perwujudan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang sah dari rakyat.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang, hak yang melekat dan tidak bisa dibantah oleh orang lain.

Menurut Mahfud M.D, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan hak tersebut dibawa sejak lahir kepermukaan bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati) bukan merupakan pemberian manusia atau negara.¹⁹

Sama halnya dengan orang berkebutuhan khusus (disabilitas) juga memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya yang umumnya secara fisik dan mental normal. Penyandang disabilitas adalah orang yang hidup dengan karakteristik yang berbeda inilah yang merupakan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Orang yang berkebutuhan khusus memiliki definisi yang luas, mencakup cacat fisik, cacat mental, kemampuan *intelligence quotient* (IQ) rendah, serta orang dengan permasalahan yang kompleks sehingga fungsi kognitifnya mengalami gangguan.²⁰

Salah satu bentuk partisipasi politik dari penyandang disabilitas mental adalah hak pilih dalam pemilihan. Hak itu diperkuat dalam UU No.7 Tahun 2017 yang diperkuat dengan peraturan KPU yang juga dijamin dalam UUD 1945, UU HAM, UU Kesehatan, UU Pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang

¹⁹ Muh.Yahdi, *Pendidikan Kewarganegaraan kontemporer, Membangun Kearifan Berbangsa* (Makassar : Alauddin press, 2014) h. 149

²⁰Muliadi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat Konsep & Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung : Refika Aditama, 2005) h. 253

disabilitas, UU Kesehatan jiwa dan yang terakhir adalah Putusan MK Nomor :135/PUU-XII/2015.

Banyaknya peraturan yang mengatur mengenai hak-hak yang didapatkan oleh penyandang disabilitas mental salah satunya adalah hak politik. Hak politik adalah hak dasar yang didapatkan oleh setiap warga negara Indonesia sebagai kontribusi untuk membangun bangsa Indonesia. Hal tersebut tetap menjadi persoalan yang belum terpecahkan sampai sekarang. Jumlah penyandang disabilitas mental setelah dilakukan pendataan oleh KPU sebanyak 3.500 jiwa yang terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena adanya pembatasan oleh KPU.

Pada pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU No.11 Tahun 2018 yang berbunyi : “Pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b) sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter”. Peraturan tersebut sudah dihapus oleh KPU dan sedang dalam peninjauan.²¹

Pengidap penyakit gangguan jiwa bukanlah sebuah penyakit yang muncul karena keinginan sang penderitanya, gangguan jiwa disebabkan oleh ketidakmampuan penderitanya untuk menahan tekanan dalam hidupnya. Orang yang mengalami gangguan jiwa menggunakan hak pilihnya tidak didasarkan pada diagnosis maupun gejalanya melainkan berdasarkan pada kapasitasnya untuk memahami tujuan pemilu, alasan ia berpartisipasi dan penilaian pribadi terhadap calon yang akan dipilih.

Pemilihan umum adalah satu upaya untuk mempengaruhi warga secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan tindakan retorika, hubungan publik, komunikasi massa. Pemilihan umum juga merupakan sarana dalam menggunakan hak pilih setiap warga negara. semua warga negara yang telah didata oleh KPU

²¹<https://www.liputan6.com/news/read/3937177/headline-kontroversi-3500-pemilih-dengan-gangguan-jiwa-di-pemilu-2019-aturannya>. (Diakses pada tanggal 22 juli 2019)

mempunyai hak yang sama. Hak suara yang dapat digunakan pada saat pemilihan umum berlangsung.

Setiap warga negara yang tinggal di Indonesia maupun diluar negara Indonesia selama masih berstatus sebagai warga negara indonesia dan belum berganti kewarganegaraan memiliki hak pilih yang sama untuk mengikuti proses demokrasi hnggga selesai.

Kontroversi yang terjadi dimasyarakat terkait dengan hak pilih penyandang disabilitas mental banyak yang mendukung dan juga menolak dan menanggapi secara negatif baik dalam bentuk penolakan, merendahkan dan juga dijadikan sebagai lelucon yang justru semakin jauh dari upaya pemenuhan hak asasi manusia pada penyandang disabilitas seperti yang telah diatur oleh UU Pemilu.

Dari penjelasan tersebut menjelaskan bahwa partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga yang tidak menaruh perhatian terhadap masalah negara, pada umumnya partisipasi yang rendah dianggap sebagai legitimasi yang rendah pula. Masyarakat yang tidak melibatkan diri dengan kegiatan politik memiliki banyak arti salah satunya adalah masyarakat itu cenderung apatis karena mengangaap bahwa hak suara warga negara tidak akan memiliki banyak pengaruh dan perubahan dalam sistem pemerintahan.²²

²²Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h.369

Keikutsertaan penyandang disabilitas mental dimulai dari terdatanya mereka pada sensus penduduk yang dilakukan oleh KPU. Sensus penduduk dilakukan beberapa bulan sebelum pemilihan umum berlangsung. Syarat-syarat seperti harus dilengkapi dengan surat keterangan dokter masih menjadi polemik dan belum dilakukan secara optimal sehingga penyandang disabilitas mental tetap mempunyai hak untuk didata oleh tim KPU.

I. Pengertian Hukum Tatanegara Islam

Hukum ketatanegaraan yang dalam prakteknya membahas mengenai tata negara, bentuk negara, unsur negara dll. Sedangkan, Hukum Ketatanegaraan Islam adalah hukum yang membahas tentang ketatanegaraan Islam dan segala bentuk negara yang berhubungan dengan keislaman.

J. Pandangan Hukum Tata Negara Islam Tentang Disabilitas Mental

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim didalamnya walaupun, Indonesia memiliki mayoritas penduduk muslim tidak menjadikan Indonesia sebagai negara dengan sistem Islam secara menyeluruh. Indonesia pada prinsipnya dan dalam aspek ketatanegaraannya lebih khusus ke sistem atau pemikiran-pemikiran barat. Indonesia yang sistem pemerintahannya adalah presidensial berbeda dengan negara-negara Islam ditimur tengah yang menganut sistem ketatanegaraan Islam yang dipimpin oleh seorang raja bukan presiden.

Eksistensi hukum Islam di Indonesia dalam UUD 1945 yang berbunyi “Ketuhanan yang maha esa” yang secara jelas merujuk pada konsep ketuhanan sebagai dasar awal pembentukan sebuah negara. dalam Islam sendiri dikenal ”Piagam Madinah” sebagai undang-undang umat islam pertama yang merupakan dasar-dasar bernegara oleh umat Islam pada zaman nabi dan para sahabatnya.

Dalam ranah politik Islam dikenal pemikir-pemikir politik Islam mengenai dasar negara maupun politik yang muncul pada abad klasik, abad pertengahan,

dan abad modern. Jika dilihat dari konsep ilmu politik, konsep negara merupakan konsep yang dominan, dimana jika berbicara mengenai politik berarti berbicara mengenai ketatanegaraan. Dalam konsep pemikiran politik Islam sudah dikenal banyak pemikir-pemikir Islam yang membahas mengenai negara dan politik. al-Mawardi, al-Farabi dan al-Gazali adalah pemikir Islam zaman abad klasik pertengahan yang sampai di zaman sekarang konsep-konsep yang diberikan masih sangat relevan untuk dijadikan bahan rujukan dalam mempertimbangkan hukum.

Salah satu pemikir berpengaruh dalam dunia Islam adalah Ibnu khaldun. Ibnu khaldun membagi proses pembentukan kekuasaan politik menjadi 3 jenis:

1. Politik dan pemerintahan yang proses dan bentukannya didasarkan atas naluri politik manusia untuk bermasyarakat dan membentuk kekuasaan.
2. Politik dan pemerintahan yang dasar pertimbangannya didasarkan pada akal sehat semata dengan tanpa berusaha yang mencari petunjuk ilahi.
3. Politik dan pemerintahan yang proses pembentukannya dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah agama yang telah diwariskan.

Ibnu khaldun menyebut ketiga jenis ini dengan sebutan *al-siyasah al-madaniyah*, *al-mulk al-thaby'i* dan yang ketiga adalah *al-siyasah al-diniyah* atau *syar'iyah*.²³

Politik, tata negara dan Islam adalah serangkaian kata yang saling berhubungan erat. Seperti halnya pemilihan kepala negara atau pemilihan kepala pemerintahan suatu daerah dibutuhkan perpolitikan untuk mendapat dukungan suara dari rakyat agar nantinya bisa terpilih dipemilihan umum. Banyak cara yang

²³Muhammadhidayatmuhtar. <https://www.kompasiana.com/hidayat21/5bd0496843322f214b431865/konstitualisme-hukum-islam-dalam-ketatanegaraan-indonesia> (Diakses pada tanggal 5 agustus 2019)

dapat ditempuh untuk memajukan bangsa Indonesia salah satunya adalah ikut serta berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan umum menjadi ajang untuk mencari bangku kekuasaan disebuah instansi negara. jika dilihat lebih cermat angka pertumbuhan penduduk setiap tahunnya selalu meningkat. Meningkatnya jumlah penduduk berarti meningkat jumlah calon pemilih pada pesta demokrasi Indonesia.

Dalam hukum ketatanegaraan Islam, dikenal istilah mukkalaf yang memiliki arti sebagai seseorang yang dapat dibebani hukum yang artinya sejalan dengan konsep atau syarat dalam pemilihan umum yang berusia 17 tahun atau telah menikah bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia agar mampu menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum antara lain seperti :

1. Warga negara Indonesia
2. Warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau sudah menikah
3. Terdaftar dalam daftar pemilih tetap
4. Tidak sedang terganggu jiwanya
5. Tidak tercabut hak politiknya karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
6. Seorang purnawirawan tentara nasional Indonesia (TNI).²⁴

Pada persyaratan tersebut terdapat pembatasan hak yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang sedang mengalami gangguan jiwa atau mental. Hal tersebut selaras dengan pandangan Islam yang menjelaskan tentang syarat-syarat seseorang dapat dibebani hukum adalah orang tersebut telah baligh dan dapat

²⁴<https://aptika.kominfo.go.id/2019/04/kenali-syarat-dan-kategori-pemilih-dalam-pemilu-2019> (Diakses pada tanggal 22 juli 2019).

berfikir jernih dan tidak sedang terganggu jiwanya, orang dengan syarat tersebut dalam islam dapat dikatakan sebagai seorang mukkalaf. Mukkalaf dalam Islam diartikan sebagai seseorang yang telah dewasa dan bisa dikenai hukum dan dalam islam seseorang bisa dikenai hukum jika dia bisa mempergunakan akal nya dengan baik.

Sesuai dengan hadis rasulullah :

رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبيحتيبلغ، وعن المجنونحتيشفيق، وعن النائمحتييستيقظ

Dari Rasulullah saw bersabda, “Pena diangkat (kewajiban tidak diberlakukan) terhadap tiga (golongan) terhadap anak kecil hingga baliq, terhadap orang gila hingga sadar (sembuh), dan dari orang tidur hingga bangun.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).²⁵

Merujuk pada hadis diatas bahwa seseorang yang mengalami gangguan jiwa tidak diberlakukan kewajiban hukun sampai dia sadar (sembuh) dan apabila dikemudian hari dia sembuh maka, orang tersebut dapat kembali dibebani hukum dan dapat kembali mendapatkan haknya.

Syarat tersebut memberikan pembatasan kepada penyandang disabilitas mental untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum orang yang mengalami jiwanya dianggap tidak cakap hukum dan tidak dapat dibebani hukum. Sementara pada UU No.19 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*) menjelaskan bahwa semua orang berhak dilindungi, dijamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas

²⁵Abi Abdir Rahman Syarfl Haq Muhammad Asyraf Ash-shiddiqi al-‘Adzimi Abadii, ‘Aunul Ma’bud syarh Sunan Abi Daud (Cet:Darul Faiha Dimasyd wa Darus salam ar-Riyadh 2013/1434 H), Juz 12 h. 63 Juz.

serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak-hak sebagai berikut : Hak hidup, hak bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsensi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan warga negara, bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, peniksaan dan eksploitasi.²⁶

Peraturan yang mengizinkan penyandang disabilitas mental untuk dimasukan dalam daftar pemilih ada pada putusan Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang menjelaskan bahwa: "penyandang disabilitas dimasukan dalam daftar pemilih".

Stigma mengenai gangguan jiwa atau disabilitas mental dikalangan masyarakat itu kurang baik. Masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang memahami masalah-masalah psikologis yang ada dalam lingkup kehidupan. Masyarakat cenderung melabeling seseorang dengan sebutan "gila" dengan beberapa indikasi seperti kerasukan jin atau pelet. Masyarakat awan yang masih melihat penyakit mental sebagai penyakit kiriman dari seseorang melalui kekuatan ilmu sihir.

Pada hakikatnya gangguan jiwa muncul karna tekanan yang diberikan atau didapatkan oleh seseorang tidak dapat diterima lagi oleh akal dan jiwanya. Tekanan-tekanan yang besar yang selalu diberi oleh manusia lainnya membuat

²⁶Republik indonesia, Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang *Penyandang Disabilitas*

seseorang kehilangan daya logisnya untuk berfikir, sehingga muncul beberapa penyakit kejiwaan yang masih belum umum terjadi dikalangan masyarakat .

Dalam Islam, penyakit kejiwaan diidentikan dengan penyakit kurang bersyukur. Penderitanya dianggap sebagai manusia yang memiliki banyak penyakit hati. Pada kategori umum, penyakit jiwa adalah kelainan mental yang dicirikan oleh gangguan fungsional seperti warisan keturunan yang tidak menyenangkan yang dilengkapi dengan permasalahan-permasalahan hidup dan pengalaman hidup yang merugikan.

Dalam padangan Islam, penyakit jiwa ini termasuk dalam perilaku yang buruk dan sifat yang tercela (*al-akhlaq al-mazmumah*) seperti tamak, dengki, iri hati, arogan, emosional dan seterusnya. Hasan Muhammad as-Syargawi dalam kitabnya *Nahw 'ilmiah Nafsi* membagi penyakit jiwa dalam 9 bagian yaitu : Pamer (*Riya'*), Marah (*al-ghadhab*), lalai dan lupa (*ghaflah wan nisyah*), was-was (*al-wasah-wasah*), frustrasi (*al-ya's*), rakus (*tama'*), terperdaya (*al-ghurur*), sombong (*al-ujub*), dengki dan iri hati (*al-hasd wal hiqd*) dari beberapa sifat tercela diatas ada relevansinya dengan penyakit jiwa sebab dalam kesehatan mental (mental hygiene) merupakan indikasi dari penyakit kejiwaan.²⁷ Beberapa penyakit hati tersebut memiliki relevansi dan merupakan indikasi dari gangguan kejiwaan.

Maka, dari itu dijelaskan dalam QS. Yunus/10 : 57:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْوِينُ عِظَمٍ مِّنْ بَٰرِكُمْ شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

Terjemahannya :

²⁷Dr. HM Zainuddin, "Jurnal ilmiah Terapi Jiwa Menurut Islam" Vol 1 No.1 (2014), Jurnal Uin Malang (Diakses pada tanggal 27 juli 2019)

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”²⁸

Kelompok ayat ini kembali kepada persoalan pertama yang disinggung oleh surah ini yang sekaligus menjadi salah satu topik utamanya. Yaitu keheranan mereka atas turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad saw terhadap mereka, setelah bukti kebenaran al-Qur'an dipaparkan bahkan ditantang. Kini kepada semua manusia ayat ini menyampaikan fungsi wahyu yang mereka ingkari dan lecehkan itu. *Hai seluruh manusia*, dimana dan kapan pun sepanjang masa, sadarilah bahwa *sesungguhnya telah datang kepada kamu* semua pengajaran yang sangat agung dan bermanfaat dari Tuhan Pemelihara dan Pembimbing kamu yaitu al-Qur'an Al- Karim *dan obat* yang sangat ampuh *bagi apa*, yakni penyakit-penyakit kejiwaan yang terdapat dalam dada, yakni hati manusia *dan petunjuk* yang sangat jelas menuju kebenaran dan kebajikan *serta rahmat* yang amat besar lagi melimpah *bagi orang-orang yang mukmin*.

Ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah *obat bagi apa yang terdapat dalam dada*. Penyebutan kata *dada* yang diartikan dengan *hati*, menunjukkan bahwa wahyu-wahyu ilahi itu berfungsi menyembuhkan penyakit-penyakit rohani seperti ragu, dengki, takabur, dan sebagainya. Memang dalam Al-Qur'an, hati ditunjuknya sebagai wadah yang menampung rasa cinta dan benci, berkehendak dan menolak.²⁹

Dari ayat ini juga menjelaskan bahwa setiap penyakit yang ada dalam tubuh manusia dan setiap penyakit yang ada dimuka bumi ini selalu ada obatnya atas izin Allah SWT. Maka, sudah sepantasnya manusia selalu berserah diri kepada Tuhan dan menjauhi sifat-sifat tercela agar selalu terhindar dari penyakit-

²⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*(Jakarta: Dharma Art, 2015)

²⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Volume 5* (Jakarta: Lentera Hati, 2002),h.438.

penyakit jiwa yang merupakan penyakit hati yang tidak disukai oleh Allah Swt dan hendaknya kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan agar kita berada di jalan yang lurus.

Seseorang dikatakan memiliki mental yang sehat, bila ia terhindar dari gejala penyakit jiwa dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk menyelaraskan fungsi jiwa dalam dirinya. Begitu juga sebaliknya, seorang dikatakan kurang sehat mentalnya adalah orang yang merasa terganggu perasaan, pikiran, sehingga mendatangkan ketidaktertaman hatinya (abnormalitas mental). Adapun abnormalitas mental ini, biasanya disebabkan karena ketidakmampuan individu dalam menghadapi kenyataan hidup sehingga muncul konflik mental pada dirinya. Golongan yang kurang sehat adalah orang yang merasa terganggu ketentraman hatinya. Adanya abnormalitas mental ini biasanya disebabkan karena ketidakmampuan individu dalam menghadapi kenyataan hidup, sehingga muncul konflik mental pada dirinya.³⁰

Ada beberapa penyebab seseorang mengalami gangguan jiwa seperti kepergian secara tiba-tiba orang yang dikasihinya atau disayanginya, mengalami peristiwa kurang menyenangkan dimasa kecilnya, menjadi korban bullying dan body shaming, korban pelecehan seksual atau pemerkosaan dan juga faktor genetik keturunan.

³⁰Mulyadi, *Konsep dasar kesehatan mental* (Repository UIN Imam Bonjol, 2017) h. 19

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara seksama dan teliti untuk memperoleh sebuah kebenaran. Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dan dengan jalan menganalisisnya.³¹

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yang bersifat kualitatif deskriptif dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung ke lokasi survey atau melakukan interaksi secara langsung dalam instansi terkait untuk memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan pedoman-pedoman pengambilan data yang sesuai dengan berprosedur yang berlaku.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi wilayah atau tempat penelitian berlokasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dengan pertimbangan jarak lokasi peneliti dengan tempat tersebut berada dalam satu wilayah dengan peneliti.

a. Gambaran umum Komisi Pemilihan Umum Indonesia

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

³¹Hudzaifah Dimyanti dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: t.p, 2004), h. 1-2.

Sebelum Pemilu 2004, KPU dapat terdiri dari anggota-anggota yang merupakan anggota sebuah partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4/2000 pada tahun 2000, maka diharuskan bahwa anggota KPU adalah non-partisan. Ketua KPU periode pertama adalah Prof. Dr. Abdul Hafiz Anshari A.Z, M.A.

Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi KPU pertama dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April. KPU ketiga dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2014, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil. Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu.

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggungjawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Indonesia.

Komisi pemilihan umum di Indonesia dibentuk sejak era reformasi tahun 1998 dan mengalami banyak perubahan dan peningkatan kualitas agar dapat berfungsi secara efektif, jujur dan adil. Komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang independen.

Pada tahun 2009 Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan mampu berfungsi secara efektif dan mampu melakukan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:

- 1) Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- 2) Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
- 3) Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
- 4) Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
- 5) Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
- 6) Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
- 7) Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum³².

³²https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum (Diakses pada tanggal 17 november 2019)

b. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa

Komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU sebagai lembaga independen yang bekerja secara efektif yang diharapkan mampu memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum secara jujur dan adil..

Kabupaten Gowa adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan. Ibukota kabupaten ini terletak di Sungguminasa yang memiliki luas wilayah 1.883,32 km² dan berpenduduk sebanyak ± 652.941 jiwa.

Komisi pemilihan umum Gowa terletak di Kabupaten Gowa beralamat di Jl. Andi Mallombasang No.69, Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92114. Ketua komisi pemilihan umum dengan masa jabatan 2018-2023 adalah Muhtar Muis, SS.

KPU adalah suatu lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang meliputi pemilihan DPR RI, DPR PROV, DPRD dan BUPATI. KPU Gowa melaksanakan pemilihan pertama kali pada tahun 2003 yakni pemilihan DPRD, DPR PROV, DPR RI yang dilakukan serentak diseluruh Indonesia. KPU dipimpin oleh 5 komisioner yang memiliki masa jabatan 5 tahun dalam 1 periode.



Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sumber gambar dari : Ayo

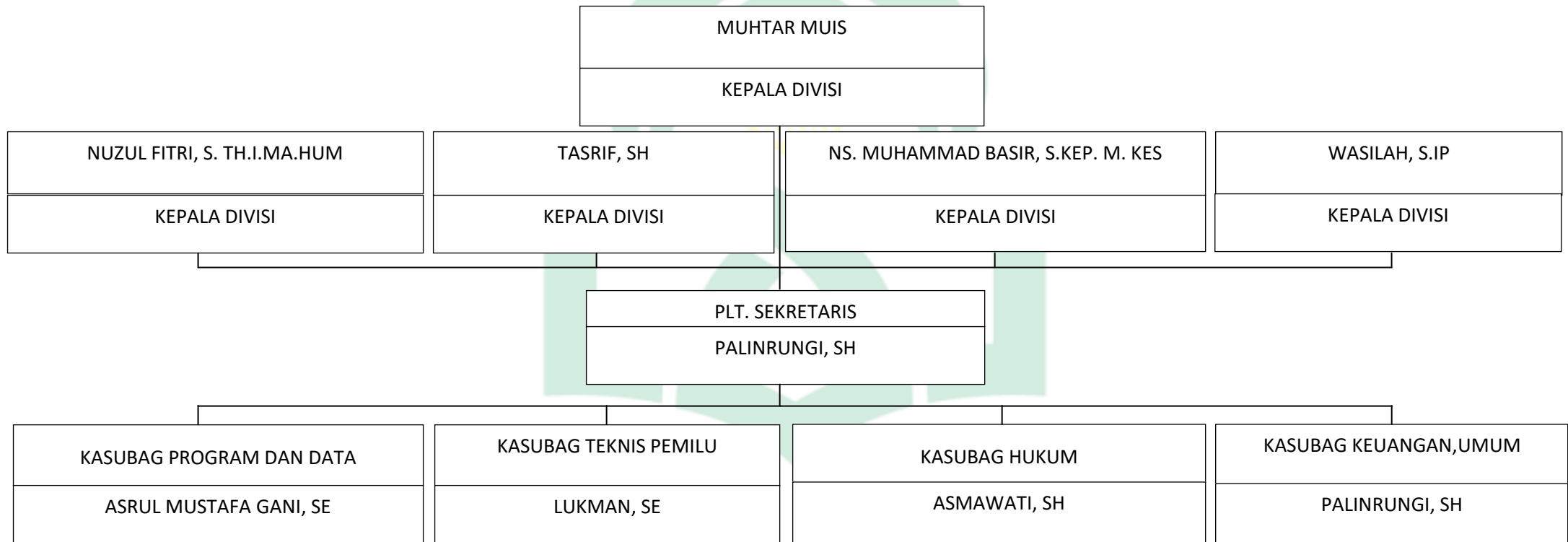


Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa. Sumber gambar dari :

Islamiah ilyas

Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa akan ditampilkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
PERATURAN KPU NOMOR, 05 TAHUN 2008 TANGGAL 2 APRIL 2008



Sebagai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemilihan umum di kabupaten Gowa, tentunya memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi

- b. Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan

Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Ada 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa, yakni sebagai berikut :

1. Kecamatan Bajeng
2. Kecamatan Bajeng Barat
3. Kecamatan Barombong
4. Kecamatan Biringbulu
5. Kecamatan Bontolempangan
6. Kecamatan Bontomarannu
7. Kecamatan Bontonompo
8. Kecamatan Bontonompo Selatan
9. Kecamatan Bungaya
10. Kecamatan Manuju
11. Kecamatan Pallangga
12. Kecamatan Parangloe
13. Kecamatan Parigi
14. Kecamatan Pattalassang
15. Kecamatan Somba Opu
16. Kecamatan Tinggimoncong
17. Kecamatan Tombolo Pao
18. Kecamatan Tompobulu

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang meneliti bahan pustaka dan peraturan-peraturan yang ada.

2. Pendekatan Syar'i

Pendekatan syar'i adalah pendekatan yang berdasarkan hukum islam.

C. Sumber Data

1. Sumber data primer

Sumber data yang didapatkan melalui penelitian lapangan dengan melalui wawancara.

No	Informan	Jabatan	Keterangan
1	Ketua KPU Gowa		
2	Anggota		
3	Masyarakat		

2. Sumber data sekunder

Data didapatkan melalui data yang berada dalam instansi seperti dokumen, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk menunjang penelitian ini sangat dibutuhkan data yang cukup untuk melengkapi data dan menjaring data yang diperlukan maka, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah pra penelitian atau pengenalan lapangan pada pengumpulan data sebelum penelitian resmi.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab ke responden dengan langsung pada sumber terpercaya dan kredibel yang berada dalam wilayah pembahasan agar didapatkan yang akurat sesuai dengan permasalahan dan pembahasan yang ada.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mengkaji, dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data melalui literatur-literatur yang ada pada perpustakaan.

E. Instrumen Penelitian

1. Peneliti sendiri adalah mahasiswa semester akhir yang melakukan tugas akhir.
2. Pedoman Wawancara adalah suatu alat yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden berupa pertanyaan.
3. Alat Tulis yang mendukung proses wawancara dan mencatat sumber data.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Pada metode ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengolahan data :

- a. Reduksi data adalah proses mengubah data pada sebuah pola, focus permasalahan dalam beberapa kategori yang masuk dalam pokok-pokok permasalahan.
- b. Penyajian data adalah penyajian data sesuai dengan bentuk yang diinginkan yang kemudian ditampilkan dalam bentuk analisis dan penjelasan data.

- c. Pengambilan Kesimpulan adalah mencari kesimpulan atas data yang direduksi dan disajikan.

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian terhadap keabsahan data sangat penting dilakukan untuk menghindari kekeliruan serta dapat membuktikan secara tertulis bahwa data yang didapatkan berasal dari informan-informan terpercaya dan merupakan data dari hasil wawancara secara langsung yang ditampilkan dalam surat keterangan wawancara yang berisi data informan.



BAB IV

HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM PRESPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM (STUDI KASUS DI KPU GOWA)

A. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Di KPU Gowa.

Setiap warga negara Indonesia wajib diberikan semua haknya, dimulai dari hak politik, hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak mendapatkan kesejahteraan, hak hidup dan hak-hak yang lainnya. Hak merupakan sesuatu yang wajib didapatkan oleh setiap manusia dimulai dari sejak dia berada didalam kandungan sampai dia meninggal.

Salah satu hak yang wajib diberikan adalah hak politik. hak politik wajib diberikan kepada semua orang baik yang normal secara fisik hingga yang mengalami gangguan jiwa seperti disabilitas mental. disabilitas mental adalah seseorang yang mengalami keterbatasan dalam berinteraksi dengan manusia lainnya.

Untuk mengetahui apakah penyandang disabilitas mental mendapatkan hak politiknya maka, dilakukan wawancara langsung dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Bapak Muhtar Muis terkait mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas mental di kabupaten Gowa.

”Untuk masyarakat yang mengalami gangguan baik itu fisik ataupun pikiran atau disabilitas di KPU Gowa kita mengakomodir ruang-ruang khusus yang diberikan salah satunya dalam proses pendataan untuk

mereka yang menyandang disabilitas, kita pisahkan dengan pemberian tanda khusus pemilih-pemilih yang disabilitas. sehingga, penempatan di TPS mereka sudah bisa kita deteksi butuh alat bantu khusus untuk penyandang disabilitas. Kemudian dari peningkatan partisipasi penyandang disabilitas kami sebagai KPU merekrut tenaga untuk bersosialisasi. dalam hal ini KPU yang membentuk relawan demokrasi.”³³

Dari wawancara diatas dijelaskan bahwa semua masyarakat dikabupaten Gowa diberikan kesempatan yang sama untuk ikut menjadi bagian dari penyelenggara pada pesta demokrasi. pemenuhan hak penyandang disabilitas mental yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab.Gowa adalah hak untuk ikut berpartisipasi sepanjang masyarakat tersebut telah dinyatakan sembuh dan dapat kembali beraktivitas seperti masyarakat normal lainnya. adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang pernah mengalami gangguan mental salah satunya adalah surat keterangan dokter yang menyatakan dirinya sembuh dan dianggap memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh negara.

Secara umum KPU Gowa secara terbuka membuka ruang-ruang khusus untuk semua kategori penyandang disabilitas yang ingin ikut terlibat dalam proses pemilihan umum dimulai dari menjadi relawan, membantu mensosialisasikan pemilu hingga tahap ikut serta dalam pemilihan umum. Hal ini sudah menjadi langka awal yang dilakukan oleh KPU Gowa dalam memberikan kesempatan kepada para penyandang disabilitas untuk ikut terlibat dalam pesta demokrasi.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Gowa Bapak Muhtar Muis membagi beberapa macam gangguan keterbatasan dalam beberapa bagian :

³³Muhtar Muis, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab.Gowa, wawancara, Gowa tanggal 13 November 2019.

“Kita kan (KPU) untuk pemilih disabilitas, kami membagi dalam beberapa bagian seperti Tuna Rungu (gangguan pendengaran), Tuna Netra (gangguan penglihatan), Tuna Grahita (gangguan intelektual). Disabilitas mental ini kan masuk dalam kategori Tuna Grahita dan yang beredar dimasyarakat kan tersebar bahwa ‘orang gila’ diberikan hak untuk memilih padahal kan diundang-undang dijelaskan bahwa ‘mereka yang mengalami gangguan mental dalam hal ini Tuna Grahita bukan orang gila yang berkeliaran dijalan’. Jadi, tidak mungkin ‘orang gila’ yang berkeliaran dijalan yang diberi hak. Tetapi, Tuna Grahita yang berada di rumah-rumah sepanjang belum ada keterangan dokter yang menyatakan dia sudah divonis dokter ‘gila’ itu masih mempunyai hak pilih dan tetap didata kecuali, Mereka yang sudah berkeliaran dijalan itu kan sudah tidak jelas ditanya pun sudah tidak mungkin memberikan keterangan valid dan tidak dapat menunjukkan identitas dirinya. Akan tetapi, ketika mereka masih mempunyai keluarga masih bisa kita dapatkan identitasnya masih bisa kita masukan dalam daftar pemilih”.³⁴

Pada wawancara tersebut dijelaskan bahwa selama orang tersebut belum mendapatkan vonis dari dokter maka, dia masih bisa menggunakan hak pilihnya. Tetapi, jika orang tersebut sudah mendapatkan vonis dari dokter dan didiagnosis secara penuh mengalami gangguan jiwa berat dan membutuhkan penanganan secara intensif maka, sudah dapat dipastikan bahwa warga negara tersebut terhalang hak politik dan hak pilihnya dalam mengikuti pemilihan umum.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.Gowa juga mengatakan bahwa apabila anggota masyarakat yang mengalami gangguan mental jika masih dalam tahap ringan seperti masih mengenali keluarganya, masih memiliki identitas lengkap, tidak berkeliaran dijalan, maka anggota masyarakat tersebut masih memiliki hak untuk didata dan dimasukan kedalam daftar pemilih sementara. Sedangkan, anggota masyarakat yang mengalami gangguan jiwa berat yang tidak dapat mengenali lagi keluarganya, tidak memiliki identitas yang

³⁴Muhtar Muis, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab.Gowa, wawancara, Gowa tanggal 13 November 2019.

lengkap, berkeliaran dijalanan serta tidak lagi dapat berkomunikasi dengan baik maka, anggota masyarakat tersebut dianggap tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan umum berlangsung.

Tuna grahita (gangguan intelektual) berbeda dengan disabilitas mental. gangguan intelektual adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fungsi berfikir atau fungsi adaptif karna tingkat kecerdasan dibawah rata-rata dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Disabilitas intelektual bukanlah penyakit kejiwaan dan tidak juga berhubungan dengan masalah kejiwaan. Disabilitas mental berkaitan dengan masalah perubahan kepribadian. Semua orang berpotensi mengalami gangguan jiwa sedangkan disabilitas intelektual berkaitan dengan kecerdasan manusia yang dibawah rata-rata manusia normal.

Secara spesifik Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Gowa pada saat wawancara belum mengetahui secara jelas perbedaan antara disabilitas mental dan disabilitas intelektual. Disabilitas Intelektual memenuhi syarat menjadi pemilih dan dapat menggunakan hak pilihnya. Sedangkan, disabilitas mental baru akan mendapatkan haknya setelah pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU No.11 Tahun 2018 dihapuskan dan sedang dalam peninjauan.

Kepala Sub Bagian Program dan Data Bapak Asrul Mustafa Gani, SE

mengatakan bahwa :

“Untuk Tuna Grahita atau gangguan jiwa kita ada kategorinya, kalau ada surat keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan telah mengalami gangguan jiwa sudah tidak berhak jika sudah ada suratnya atau dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) untuk menjadi seorang pemilih. Kalau tidak ada suratnya maka, kami tidak berani bahwa yang bersangkutan tersebut telah mengalami gangguan jiwa, jangan sampai pada saat hari pencoblosan dia sembuh. Jadi, basisnya kami itu ketika pemilih dinyatakan sakit jiwa itu harus ada keterangan dokter, walaupun ada keluarganya yang menyampaikan bahwa dia tidak bisa menggunakan haknya, itu kayaknya harus ada surat keterangan dari keluarganya atau surat pernyataan begitu yang bersangkutan memang tidak memenuhi syarat karna gangguan jiwa dan hak pilihnya juga tidak dapat diwakilkan karna aturannya kan 1 surat suara untuk 1 orang, kalau diwakilkan kan bisa jadi disalahgunakan. Tetapi, ditahun yang akan datang ketika dia sembuh karna itukan penyakit yaa..yang bisa sembuh”.³⁵

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.Gowa memasukan gangguan jiwa dalam kategori disabilitas intelektual (Tuna Grahita). Padahal, jika diteliti dengan baik disabilitas mental dan disabilitas intelektual adalah dua hal yang berbeda. Disabilitas mental adalah gangguan jiwa yang menyerang sistem saraf dan mengakibatkan seseorang mengalami halusinasi dan gangguan kecemasan berlebih. Disabilitas mental bukan penyakit yang dapat dideteksi sebelum terjadinya kelahiran. Berbeda dengan disabilitas intelektual yang dapat dideteksi saat masih didalam kandungan. Disabilitas mental biasanya terjadi pada saat seseorang mengalami suatu kejadian yang menyedihkan atau membuat seseorang

³⁵Asrul Mustafa Gani, Kepala Bagian Program dan Data ,wawancara, Gowa tanggal 13 November 2019.

ketakutan. Seperti, korban kekerasan dalam rumah tangga, korban bullying, korban kekerasan seksual dan korban pemerkosaan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.Gowa Bapak Muhtar Muis mengatakan :

“Sebenarnya, kita terbuka untuk menjadi penyelenggara pun bisa, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah diatur. Kan ada persyaratan-persyaratan yang diberikan untuk pengecualiaan teman-teman penyandang disabilitas juga ada ketentuannya yang tidak bisa dikecualikan. Kalau dari KPU sendiri penyandang disabilitas kita libatkan menjadi penyelenggara juga, kalau yang khusus mengalami gangguan mental itu yang kami KPU selama ini tidak ada atau belum ada yang mendaftar. Karna mungkin lebih banyak yang mengalami gangguan fisik daripada mental”.³⁶

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.Gowa belum dapat memastikan secara penuh apakah penyandang disabilitas mental dapat menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi karna ada beberapa aturan yang harus dipenuhi oleh calon pemilih pada proses pemilihan berlangsung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.Gowa sendiri sudah memberlakukan aturan pemilih disabilitas mental boleh menggunakan hak pilihnya pada pemilihan bupati dan wakil bupati yang pelaksanaannya sedang dilakukan tahun ini (2020) sedang berlangsung proses pemilihan umum calon bupati dan wakil bupati periode 2020-2025. Komisi Pemilihan Umum Kab. Gowa secara terbuka membuka pendaftaran dari teman-teman penyandang disabilitas mental yang ingin bergabung menjadi relawan demokrasi. Komisi Pemilihan Umum Kab.Gowa memberikan hak politik secara penuh kepada warga negara indonesia yang memenuhi syarat yang telah

³⁶Muhtar Muis, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab.Gowa, wawancara, Gowa tanggal 13 November 2019.

ditetapkan oleh undang-undang. Akan tetapi, ada beberapa anggota masyarakat yang mengalami gangguan jiwa berat yang hak politiknya untuk sementara tidak dapat diberikan. Pada pemilihan umum berikutnya anggota masyarakat yang sebelumnya kehilangan haknya untuk memilih akan di cek lagi oleh petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.Gowa apakah anggota masyarakat tersebut sudah sembuh dari gangguan jiwa berat. anggota masyarakat yang mengalami gangguan jiwa berat dan telah sembuh akan dimasukan lagi kedalam daftar pemilih untuk selanjutnya dapat menggunakan hak pilihnya kembali.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Gowa menambahkan :

“Haknya sama dengan yang normal hanya saja dalam proses penyampaian suara mereka ada hal khusus yang diberikan kepada teman-teman penyandang disabilitas fisik. Jadi, hak yang diberikan adalah hak pilih termasuk hak pencalonan diri sepanjang mereka mendaftarkan tidak mungkin kita paksa. Tetap sama. Hanya partisipasinya tidak dapat dipaksakan.sekarang bukan lagi kewajiban tapi hak. Terserah mereka menggunakan atau tidak termasuk dalam hal memilih untuk mencalonkan diri tetap ada ruang-ruang untuk mereka menjadi penyelenggara, kami ada untuk teman-teman disabilitas.”³⁷

Dalam hal pemenuhan hak penyandang disabilitas mental Komisi Pemilihan Umum Kab.Gowa saat ini sedang memberlakukan dan sedang dalam proses pelaksanaan pemberian hak pilih kepada penyandang disabilitas yang memenuhi syarat dan tidak mengalami gangguan jiwa berat. Hak pilih diberikan kepada masyarakat yang tidak mengalami gangguan jiwa berat. Disabilitas mental adalah sebuah penyakit yang membuat masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan hak pencalonannya yang bersifat sementara.

³⁷Muhtar Muis, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab.Gowa, wawancara, Gowa tanggal 13 November 2019.

Pada pemilihan presiden tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia memberikan hak politik penuh pada teman-teman yang mengalami gangguan mental pada pemilihan presiden tahun 2019. ada 54 ribu pemilih yang tersebar diseluruh indonesia yang mengalami disabilitas mental dan disabilitas intelektual (Tuna grahita) yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang berarti ada 0,028% dari semua total pemilih yang ada.

Dalam Prespektif hukum ketatanegaraan islam dikenal istilah baliq atau mukallaf yang artinya seseorang yang dapat dibebani hukum. Seorang mukallaf adalah seseorang yang mampu menggunakan akal nya dengan baik dan tidak mengalami gangguan jiwa. Peraturan yang mengizinkan penyandang disabilitas mental untuk di masukan ke dalam daftar pemilih ialah Putusan Mahkamah Agung Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang menjelaskan bahwa Penyandang Disabilitas di masukan dalam daftar pemilih dan adapula peraturan KPU, UU Kesehatan hingga UU Pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas mental memperbolehkan seseorang yang mengalami gangguan jiwa ringan menggunakan haknya untuk dapat memilih pemimpinnya. Sedangkan, Dalam Islam seseorang yang terganggu jiwanya tidak dapat dibebani hukum sehingga tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak politiknya sampai dia sadar atau sembuh.

B. Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Di KPU Gowa

Partisipasi Politik adalah keterlibatan masyarakat dalam semua proses kebijakan dimulai dari proses awal perpolitikan sampai adanya keputusan termasuk ikut dalam proses partisipasi politik.

Penyandang disabilitas mental adalah warga negara masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam bersosialisasi dengan masyarakat.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Muhtar Muis mengatakan :

“Penyandang disabilitas bisa ikut berpartisipasi dan bisa mengikuti semua rangkaian dimulai dari proses sosialisasi. KPU sering melibatkan mereka dalam proses termasuk memberikan mereka edukasi, kami ada tim khusus yang memang kita sediakan bukan cuma disabilitas mental tetapi, kita sasar semua komunitas yang ada. Disabilitas khususnya di kabupaten gowa sebenarnya sih datanya masih kita ambil dari provinsi, karna yang punya wilayah sosialisasikan provinsi. Walaupun, di kabupaten Gowa sendiri sebenarnya sudah ada tapi datanya itu masih minim sementara dari catatan kami jumlah penyandang disabilitas gowa kurang lebih ada sekitar 529870.”³⁸

Kepala Sub Bagian Program dan Data Bapak Asrul Mustafa Gani mengatakan :

“Kalau untuk partisipasi sebenarnya seperti di Tempat Pemungutan Suara (TPS) itu sudah termasuk ikut berpartisipasi. partisipasi dalam memilih. Kalau sosialisasi kami memang ada tim khusus juga. khususnya Tuna Netra (gangguan penglihatan) kita kasih template seperti braille itu kan sudah termasuk fasilitas.”³⁹

³⁸Muhtar Muis, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab.Gowa, wawancara, Gowa tanggal 13 November 2019.

³⁹Asrul Mustafa Gani, Kepala Bagian Program dan Data ,wawancara, Gowa tanggal 13 November 2019.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab.Gowa menambahkan :

“Ada satu segmen khusus memang menyasar pemilih penyandang disabilitas. Jadi, ada kelompok relawan dari kami yang kerjanya dikomunitas disabilitas. Di tahun 2019 kami malah melibatkan teman-teman penyandang disabilitas dalam proses sosialisasi itu. Untuk kegiatan terkait dengan disabilitas kami bekerja sama dengan organisasi disabilitas yang ada di kabupaten gowa. Secara berkala kita lakukan untuk meningkatkan partisipasinya.”⁴⁰

Komisi Pemilihan Umum Kab.Gowa memberikan kesempatan kepada teman-teman dari penyandang disabilitas baik fisik maupun mental untuk ikut bergabung dalam pesta demokrasi. Teman-teman dari penyandang disabilitas yang menjadi relawan demokrasi mendapatkan tugas salah satunya adalah mensosialisasikan jadwal pemilihan umum. Sejauh ini, Komisi Pemilihan Umum Kab.Gowa belum mendapatkan pendaftar yang mengalami gangguan mental berat. Semua penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi. Walaupun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam proses penerimaannya. Tetapi, tidak menutup kemungkinan dari penyandang disabilitas mental ada yang ikut bergabung dan mampu berpartisipasi dan beradaptasi dengan masyarakat lainnya.

Pemilih yang mengalami gangguan mental atau disabilitas mental pada saat dilakukan pendataan oleh petugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang dalam keadaan stabil dan mendapatkan pendampingan yang baik dari keluarga maka, warga tersebut dimasukan kedalam daftar pemilih tetap. Akan tetapi, pada saat pendataan berlangsung warga tersebut mengalami gangguan jiwa

⁴⁰Muhtar Muis, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab.Gowa, wawancara, Gowa tanggal 13 November 2019.

yang berat dan tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan aparat dan warga sekitar otomatis tidak akan dimasukan kedalam daftar pemilih tetap (DPT).

Dalam hal bentuk penanganan untuk penyandang disabilitas. Komisi Pemilihan Umum Kab.Gowa memberikan keistimewaan kepada penyandang disabilitas fisik seperti Tuna Netra (gangguan penglihatan). Masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan akan diberikan surat suara khusus atau template untuk memudahkan masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan untuk memilih calon pemimpin yang diinginkannya. Untuk pendampingan khusus Komisi Pemilihan Umum sepenuhnya menyerahkan kepada petugas yang berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan arahan kepada penyandang disabilitas yang ingin memberikan hak suaranya. Petugas yang ada dilapangan tidak diperkenankan mendampingi hingga ke bilik suara. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kecurangan dalam proses pemilihan umum. Untuk penyandang disabilitas mental adalah hal yang paling sulit dideteksi. Jika seseorang sudah mendapatkan vonis dokter dan diperkuat dengan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa masyarakat tersebut mengalami gangguan mental Komisi Pemilihan Umum secara otomatis setelah beberapa proses pendataan yang dilakukan selama 6 bulan sebelum pemilihan berlangsung maka, masyarakat yang mengalami gangguan mental berat tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap (DPT). Jadi, mengenai penanganan untuk disabilitas mental berat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) itu tidak ada karna pemilih yang mengalami gangguan mental berat itu tidak dimasukan kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Dalam Islam dikenal beberapa penyakit hati yang berada dalam diri manusia, yang dapat disembuhkan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah swt. Penyakit dalam diri manusia antara lain seperti dengki, iri hati, mudah marah, egois. Sedangkan, gangguan jiwa adalah perubahan kepribadian yang didapatkan akibat trauma yang mendalam. Perubahan tersebut mengakibatkan seseorang tidak dapat menggunakan akal nya dengan baik. Mengalami kesedihan yang berlarut-larut dalam jangka waktu yang panjang dan membutuhkan bantuan psikolog dan psikiater untuk melakukan terapi dan hipnoterapi hingga dapat menimbulkan ketergantungan terhadap obat-obatan.

Seseorang yang dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum ialah seseorang yang masih dapat menggunakan akal nya dengan baik dan belum termasuk kedalam gangguan jiwa berat.

C. Pandangan Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas Mental di Kabupaten Gowa

Pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental di kabupaten Gowa masih bersifat tabu untuk dibahas dan belum ada informasi yang banyak mengenai penanganan masyarakat yang mengalami gangguan jiwa. Masyarakat di Gowa masih menganggap penyakit gangguan jiwa sebagai aib yang harus ditutupi atau sesuatu yang berasal dari ilmu hitam atau sihir. Wawancara dilakukan dengan masyarakat yang berasal dari dunia kesehatan yang bernama Nuraeni yang berdomisili di kecamatan Pallangga Kab.Gowa.

Nuraeni mengatakan :

”Seharusnya penyandang disabilitas mental itu harus mendapatkan support yang lebih besar dari keluarganya supaya dia memiliki hak yang sama. Supaya penyandang disabilitas mental itu tidak mengalami keterpurukan (down) atau keterlambatan pertumbuhan dan perkembangannya. Support keluarga yang paling utama”⁴¹

Penyandang disabilitas mental sudah seharusnya diberikan support yang banyak agar dapat kembali beraktivitas dan melanjutkan kehidupannya. Penyakit gangguan jiwa itu berasal tekanan yang terlalu banyak yang tidak dapat diterima lagi dan ditampung lagi oleh jiwa seseorang. Sehingga, menyebabkan seseorang mengalami kesedihan yang begitu mendalam yang membuat orang tersebut dapat melakukan tindakan yang berbahaya seperti bunuh diri.

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga anggota keluarganya dari dunia luar yang mampu membuat keluarganya tertekan. Keluarga harus menjadi pondasi awal atau tempat membagikan curahan hati ternyaman. Akan tetapi, tidak semua keluarga paham dengan mental health. Masih banyak keluarga yang justru menjadi penyebab seseorang mengalami gangguan mental. Tekanan yang terlalu besar dari orang tua terhadap anaknya dapat menyebabkan anak tersebut mengalami guncangan hebat dan tidak dapat merasakan kenyamanan dalam lingkungan keluarga mereka sendiri. Keluarga bisa menjadi pisau bermata dua untuk seorang anak yang sedang mengalami gangguan mental. Dari kebanyakan kasus yang ada, keluarga masih menganggap gangguan mental sebagai aib yang harus disembuyikan dan dihilangkan, memaksa anak untuk baik-baik saja dan melakukan pekerjaan yang anak tersebut tidak

⁴¹Nuraeni, Masyarakat, wawancara, Gowa, Tanggal, 19 November 2019.

kehendaki. Tidak semua keluarga paham bahwa seseorang yang sedang mengalami gangguan mental harus segera mendapatkan bantuan dari psikolog. Mendatangi rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan jiwa masih menjadi aib bagi sebagian warga negara Indonesia. Mereka malu apabila memiliki keluarga yang sedang memiliki gangguan jiwa.

Nuraeni juga menambahkan bahwa :

“Sejauh ini, penyandang disabilitas mental haknya belum terpenuhi atau haknya masih diwakili dan dipandang sebelah mata. belum ada perhatian yang begitu besar atau lebih khusus atau belum adanya tempat atau ruang untuk penyandang disabilitas pada saat pemilihan umum. Sejauh ini selama saya memilih saya belum pernah melihat penyandang disabilitas ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS).”⁴²

Sebagian masyarakat belum mengetahui bahwa penyandang disabilitas mental itu haknya terhalang dalam beberapa hal. Salah satunya adalah hak memilih. Belum semua masyarakat tau bahwa dalam beberapa aturan seseorang yang mengalami gangguan jiwa mengalami beberapa kendala dalam proses pemberian hak politik. Kendala itu disebabkan karena seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan dianggap tidak cakap hukum dan dalam Islam tidak dapat dibebani hukum. Pandangan masyarakat dan pengetahuan masyarakat tentang disabilitas terutama disabilitas mental masih sangat kurang. Masyarakat masih menganggap bahwa gangguan mental adalah penyakit yang berasal dari hal-hal yang ghaib. Pemerintah masih belum memberikan perhatian khusus kepada masyarakat-masyarakat yang mengalami gangguan jiwa atau mental. Sehingga, pengetahuan masyarakat terhadap gangguan jiwa masih sangat kurang dan

⁴²Nuraeni, Masyarakat, wawancara, Gowa, Tanggal, 19 November 2019.

keberadaan masyarakat yang mengalami gangguan jiwa sangat tertutup. Penyakit gangguan jiwa masih dianggap sebagai penyakit yang bersifat aib dimata masyarakat, sehingga banyak orang-orang yang salah dalam memahami penyakit tersebut.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.Gowa memberikan hak politik penuh kepada teman-teman yang mengalami disabilitas. Di kabupaten gowa sendiri terdapat 529870 orang total penyandang disabilitas intelektual yang memiliki kesempatan untuk menggunakan hak politiknya pada pemilihan umum. Sedangkan, data warga yang mengalami gangguan jiwa atau disabilitas mental di kabupaten Gowa belum dapat diketahui karna sedang diberlakukan dan sedang dalam proses pelaksanaan.

Masyarakat di kabupaten gowa masih memerlukan banyak informasi terkait kesehatan mental. Peduli kesehatan mental belum dilakukan secara terbuka dan belum ada komunitas-komunitas yang didirikan untuk mewadahi atau menjadi perantara antara warga dengan pemerintah. Peduli kesehatan mental harus segera dilakukan oleh pemerintah agar semua generasi penerus bangsa tidak melakukan hal-hal yang tidak di inginkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Disabilitas mental adalah penyakit mental yang membuat seseorang terhambat dan mengalami keterbatasan dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Penyakit mental muncul disebabkan karna tekanan mental yang sangat tinggi sehingga membuat siapa saja dapat mengalami hal tersebut. kondisi kehilangan semangat hidup dan berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya merupakan salah satu dampak terburuk yang dialami penyandang disabilitas mental. Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi setiap 5 tahun sekali yang diadakan untuk memilih pemimpin yang akan memimpin indonesia untuk 5 tahun yang akan datang. Lembaga independen negara yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan umum setiap 5 tahun sekali adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dalam islam seseorang yang mengalami gangguan jiwa dianggap tidak cakap atau tidak dapat dibebani hukum.

1. Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental di KPU Gowa:

Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah hak pilih. Hak pilih diberikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan umum. Sedangkan, masyarakat yang mengalami gangguan jiwa berat tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemilih. Masyarakat yang mengalami gangguan jiwa dan

mendapatkan vonis dari dokter mengalami gangguan mental berat dan diharuskan melakukan pengobatan maka, hak politiknya untuk sementara tidak dapat diberikan. Komisi Pemilihan Umum untuk sementara tidak memberikan hak pilih kepada masyarakat yang sedang mengalami gangguan jiwa berat. Tetapi, di pemilihan umum selanjutnya apabila masyarakat yang sebelumnya mengalami gangguan jiwa berat dikemudian hari dinyatakan sembuh. Komisi Pemilihan Umum akan melakukan pendataan ulang dan memberikan kembali semua hak politik penuh kepada penyandang disabilitas mental yang sebelumnya pernah mengalami gangguan jiwa berat. Peraturan ini sedang diberlakukan dan sedang dalam proses pelaksanaan.

2. Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Mental Di KPU Gowa :

Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Mental yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab.Gowa adalah hak ikut berpartisipasi dalam semua rangkaian proses demokrasi. Komisi Pemilihan Umum memberikan hak untuk dapat berpartisipasi. Partisipasi dapat dilakukan jika penyandang disabilitas mental tersebut dalam keadaan stabil. Masyarakat yang belum mendapatkan vonis dan surat dari dokter bahwa dia mengalami gangguan jiwa berat. Kebebasan dalam memilih pemimpin sudah seharusnya diberikan kepada semua warga negara Indonesia. Partisipasi politik yang diberikan seharusnya dimulai dari proses

pendataan hingga proses pemugutan suara. Penyandang disabilitas mental masih diberikan batasan dalam beberapa hal.. Komisi Pemilihan Umum Kab.Gowa juga membuka ruang untuk masyarakat mendaftar menjadi relawan demokrasi untuk membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mensosialisasikan calon yang akan dipilih. Akan tetapi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mendapatkan pendaftar relawan dari masyarakat yang mengalami gangguan mental. Masyarakat yang mengalami gangguan fisik sudah ikut berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di periode sebelumnya.

3. Pandangan Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Di Kab.Gowa. Pandangan Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas Mental di Kab.Gowa masih belum menunjukkan hal yang baik. Masyarakat di kabupaten Gowa masih sangat kurang informasi terkait dengan penyakit mental yang bisa menyerang siapa saja. Masyarakat di kabupaten Gowa masih sangat kurang informasi terhadap penyakit mental yang disebabkan oleh tekanan yang terlalu banyak yang menyebabkan penderitanya tidak sanggup lagi berfikir dengan jernih dan rasional. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa penyakit mental atau “gila” merupakan penyakit yang disebabkan oleh hal-hal yang ghaib seperti santet dan semacamnya. Masyarakat di kabupaten gowa masih belum

teredukasi dengan baik sehingga masih banyak warga yang tidak mendapatkan pertolongan yang cepat dan benar.

B. Implikasi Peneliti

1. Pemerintah Indonesia dan khususnya Komisi Pemilihan Umum seharusnya memberikan kesempatan dan berlaku adil kepada semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali dan baik itu, fisik, mental dan intelektual tanpa membedakan.
2. Memberikan kesempatan kepada semua penyandang disabilitas untuk ikut serta berpartisipasi secara penuh pada pemilihan umum.
3. Pemerintah kabupaten Gowa seharusnya dapat memberikan informasi melalui sosialisasi atau pembentukan tim sigap dalam menangani masyarakat di kabupaten Gowa yang mengalami masalah terhadap kejiwaan. Penyakit mental dapat menyerang siapa saja, tidak memandang tua atau muda. Isu penyakit mental masih sering disalah artikan oleh masyarakat awam sehingga penanganan terhadap gangguan mental tersebut masih sangat kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aunul Ma'bud syarh Sunan Abi Daud, Abi Abdir Rahman Syarfl Haq Muhammad Asyraf Ash-shiddiqi al-'Adzimi Abadii, ar-Riyadh: Darul Faiha Dimasyd wa Darus salam , 2013/1434.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2018.
- Dimiyanti, Hudzaifah dan Wardiono Kelik. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: t.p. 2014.
- Efendi, Jonaedi. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Hakim, AbdulAziz. *Negari Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana. 2018
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: Dharma Art, 2015.
- Muliadi. *Hak Asasi Manusia. Hakekat Konsep & Implikasinya Dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Refika Aditama. 2005.
- Mulyadi, *Konsep Dasar Kesehatan mental*. Repository UIN Imam Bonjol. 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: (UI-pers). 1993.
- Tim Peneliti Sistem Pemilu. *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Sebuah Laporan Penelitian*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1998.
- Yahdi, Muh. *Pendidikan Kewarganegaraan Kontemporer, Membangun Kearifan Berbangsa*. Makassar : Alauddin press. 2014.
- Dr. Kevin Adrian <https://www.alodokter.com/sakit-jiwa-ternyata-ada-banyak> (Diakses pada tanggal 2 oktober 2019).
- Dwi Hadya Jayani. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia> (Diakses pada tanggal 17 Juli 2019).
- Leski Reskinaswara. <https://aptika.kominfo.go.id/2019/04/kenali-syarat-dan-kategori-pemilih-dalam-pemilu-2019/> (Diakses pada tanggal 22 Juli 2019).
- Mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental. (Diakses pada tanggal 22 Juli 2019).

MuhammadHidayatMuhtar.<https://www.kompasiana.com/hidayat21/5bd0496843322f214b431865/konstitualisme-hukum-islam-dalam-ketatanegaraan-indonesia>(Diakses pada tanggal 5 agustus 2019).

Raden Trimutia Hatta. <https://www.liputan6.com/news/read/3937177/headline-kontroversi-3500-pemilih-dengan-gangguan-jiwa-di-pemilu-2019-aturannya>. (Diakses pada tanggal 22 Juli 2019).

Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the rights of persons with disabilities).

Wikipedia.org//wiki/hak (Di akses pada tanggal 18 september 2019).

Wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum (Diakses pada tanggal 17 november 2019).

Zainuddin, Dr. HM. *Terapi Jiwa Menurut Islam*. Jurnal Ilmiah vol.1 no.1. 2014.



RIWAYAT HIDUP



ISLAMIAH ILYAS Lahir di Sungguminasa, 21 September 1997 dari pasangan Ilyas dan Suharti Anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis pertama kali menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Pajalau pada tahun 2003 dan SMP Negeri 1 Pallangga menjadi tempat dia belajar mandiri dengan jarak sekolah dengan rumah yang lumayan jauh dan lulus pada tahun 2012. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Sungguminasa yang harus menempuh waktu 1 jam hingga sampai disekolah tersebut. Alhamdulillah, Penulis lulus pada tahun 2015. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan diterima dengan baik di jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan yang sekarang sudah berubah nama menjadi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



LAMPIRAN-LAMPIRAN

**REKAP PEMILIH DISABILITAS PERKECAMATAN DI
KAB.GOWA**

KABUPATEN : GOWA

PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO	Nama kecamatan	Jumlah	Tuna Grah ita[4]			TOTAL PEMILIH			K E T
			Desa						
			L	P	L+P	L	P	L+P	
1.	Bontonompo	14	8	6	14	14773	16389	31162	
2.	Bajeng	14	19	13	32	25376	25070	48646	
3.	Tompobulu	8	4	0	4	11297	12046	23343	
4.	Tinggimoncong	7	1	4	5	7927	8286	16213	
5.	Parangloe	7	2	1	3	6288	6773	13061	
6.	Bontomarannu	9	4	4	8	11929	12875	24804	
7.	Pallangga	16	12	8	20	41481	43950	85431	
8.	Somba Opu	14	28	23	51	47977	51414	99391	
9.	Bungaya	7	0	3	3	5912	6603	12515	
10.	Tombolopao	9	9	6	15	10639	10559	21198	
11.	Biringbulu	11	6	3	9	13808	14175	27983	
12.	Barombong	7	9	6	15	14338	15042	29380	

13.	Patttallassang	8	1	1	2	9091	9267	1835	
14.	Manuju	7	6	2	8	5496	5906	11402	
15.	Bontolempangan	8	0	1	1	6902	7066	13968	
16.	Bontonompo selatan	9	12	2	14	10989	12278	23267	
17.	Parigi	5	2	1	3	5205	5762	10967	
18.	Bajeng barat	7	8	3	11	9099	9682	18781	
	TOTAL	167	131	87	218	256727	273143	529870	

SUMBER DATA VALID DARI KPU GOWA



Wawancara Dengan Bapak Muhtar Muis, Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab.Gowa. Gowa, 13 November 2019.



Wawancara Dengan Bapak Asrul Mustafa Gani, Selaku Kepala Bidang Program dan Data. Gowa, 13 November 2019



Wawancara Dengan Ibu Nuraeni Selaku Masyarakat. Gowa, 19 November 2019



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas mental di KPU Gowa ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi penyandang disabilitas mental di KPU Gowa ?
3. Apa saja bentuk penanganan KPU Gowa dalam mendampingi penyandang disabilitas mental?
4. Apakah ada kriteria khusus penyandang disabilitas mental yang wajib diberikan hak dan tidak diberikan haknya?
5. Ada berapa jumlah pemilih di kabupaten Gowa yang terdaftar mengalami gangguan jiwa ringan dan berat?
6. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental di kabupaten Gowa ?





ALAUDDIN

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tj. (0411) 864928-864930 Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : B-361 /SH.01/PP.00.9/11/2019
Sifat : Penting
Lamp : Proposal
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Romang Polong, November 2019

Kepada Yth :
Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Prov. Sul Sel.
di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang
tersebut di bawah ini :

Nama	: Islamiyah Ilyas
Nim	: 10200115100
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan/Prodi	: Hukum Tata Negara (HTN)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Jl. Poros Limbung Boka

Bermaksud melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai
salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana., dengan judul skripsi :

**"Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Perspektif
Ketatanegaraan Islam (Studi Kasus di KPU Gowa)."**

Dosen Pembimbing :
1. Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag.
2. Dr. Hj. Halimah B., M.Ag.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang
bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan Penelitian di Kantor KPU Gowa,
terhitung mulai tanggal 5 November 2019 s.d. 5 Desember 2019.

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak diucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan



Dr. H. Muhammad Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.
Nip: 19731121200012 1 002

Tembusan
Yth Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

Sungguminasa, 27 Desember 2019

Nomor : 511/PL.08-SD/03/7306/KPU-Kab/XII/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Di -

T e m p a t

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kabupaten Gowa Nomor : 25586/S.01/2019 Tanggal 7 November 2019 perihal izin penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : ISLAMIYAH ILYAS
NIM : 10200115100
Jurusan : HTN
Judul Skripsi : "Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Perspektif Ketatanegaraan Islam (Studi Kasus di KPU Gowa"

Pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Ketua KPU Kabupaten Gowa
 2. Penelitian/ Pengambilan data tidak menyimpang dari izin yang diberikan
 3. Mentaati semua Peraturan perundang-undangan yang berlaku
 4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar copy hasil penelitian kepada KPU Kabupaten Gowa.
- Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Dr. MUHAMMAD BASIR, S.Kep.,Ns.,M.Kes

Tembusan :
1. Pertinggal.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asrul Mustafa Gani, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Data
Nama : Islamiah Ilyas
Status : Mahasiswa
Nim : 10200115100
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara. Dengan judul skripsi **Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Prespektif Hukum Ketatanegaraan Islam (Studi Kasus Di KPU GOWA)**. Pada tanggal 16 November 2019.


Gowa, 22 Januari 2019
Asrul Mustafa Gani, SE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhtar Muis, SS
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab.Gowa
Nama : Islamiah Ilyas
Status : Mahasiswa
Nim : 10200115100
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara. Dengan judul skripsi **Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Prespektif Hukum Ketatanegaraan Islam (Studi Kasus Di KPU GOWA)**. Pada tanggal 16 November

Gowa, 22 November 2019



Muhtar Muis, SS


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nuraeni, Amd-Kes
Jabatan : Masyarakat
Nama : ISLAMIAH ILYAS
Status : MAHASISWA
Nim : 10200115100
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara. Dengan judul skripsi **Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Prespektif Hukum Ketatanegaraan Islam (Studi Kasus Di KPU GOWA)**. Pada tanggal 6 November 2019.

Gowa, 19 November 2019


Nuraeni

Kekasur 4/1-2018

FORMAT PENGAJUAN JUDUL

Hal : Permohonan judul skripsi

Ketua jurusan/ Program studi

Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Di Samata-Gowa

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Islamiah ilyas

NIM : 10200115100

Semester/Kelompok : Semester 7/Kelompok C

Angkatan : 2015

Dengan ini mengajukan skripsi sebagai berikut :

- 14/2018
1. Tinjauan yuridis tindak pidana body shaming dimedia sosial dalam prespektif undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan prespektif hukum Islam.
 2. Tinjauan yuridis mengenai hak politik penyandang disabilitas mental dalam mengikuti partisipasi politik dalam pemilihan umum.
 - X Analisis yuridis pengelolaan dana desa bagi kesejahteraan masyarakat desa Panakukang kec. Pallangga kab. Gowa. / Soe az.

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuan saya ucapkan terimah kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Samata, 18 Desember 2018

Mengetahui,

Penasehat Akademik

Dr. Hamzah Hasan M.Hi

NIP. 196321311993021003

Pemohon

Islamiah ilyas

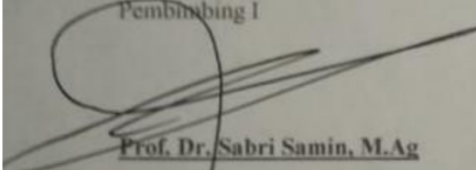
10200115100

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **ISLAMIAH ILYAS, NIM: 10200115100**, mahasiswa Jurusan HukumTatanegara (Siyasah Syar'iyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "**Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Prespektif hukum Ketatanegaraan Islam (Studi Kasus Di KPU Gowa)**". Memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian hasil.

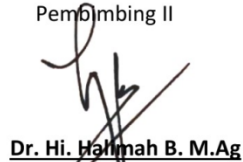
Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, Maret 2020

Pembimbing I

Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag

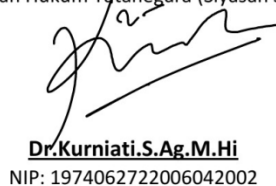
NIP. 195 1231 198703 1 022.

Pembimbing II


Dr. Hi. Halimah B. M.Ag

NIP. 19581025 199603 2001

Diketahui Oleh :
Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)


Dr. Kurniati S. Ag. M. Hi
NIP: 1974062722006042002

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor: /HTN/2019

Judul Skripsi: Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Prespektif
Ketatanegaraan Islam (Studi Kasus Di KPU Gowa)

Samata, 28 Oktober 2019

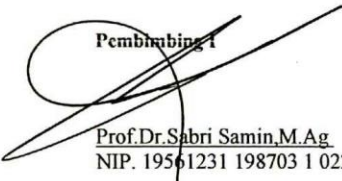
Penyusun,



Islamlah Ilyas

Nim. 10200115100

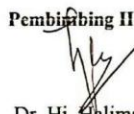
Pembimbing I



Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag

NIP. 19561231 198703 1 022

Pembimbing II




Dr. Hj. Halimah B.M.A.g

NIP. 19581025 199603 2001

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan Hukum/Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

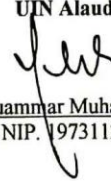


Dr. Kurniati, M.H.I.

NIP. 19740627 200604 2 002

Disahkan Oleh:

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**



Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.

NIP. 19731122 200012 1 002

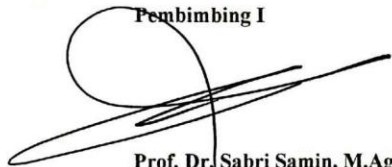
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Islamiah Ilyas**, NIM: **10200115100**, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "*Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Prespektif Hukum Ketatanegaraan Islam (Studi Kasus Di KPU Gowa)*". Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian Munaqasyah (Akhir).

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 9 November 2020

Pembimbing I



Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag
NIP. 195 1231 198703 1 022

Pembimbing II




Dr. Hj. Halimah B. M. Ag
NIP. 19581025 199603 2 001

Penguji I



Dr. Nila Sastrawati, M. Si
NIP. 19710712 199703 2 002

Penguji II



Dr. Hj Rahmiati, S Pd. M.Pd
NIP. 19771005 200901 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

ALAUDDIN Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sunqquminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 321 Tahun 2019

T E N T A N G

PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR PROPOSAL/SKRIPSI TAHUN 2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** :
- | | | |
|-----------------|---|--|
| Surat Pemohonan | : | |
| Nama | : | Islamiyah Ilyas |
| N I M | : | 10200115100 |
| Jurusan | : | Hukum Tatanegara (Siyasa Syar'iyah) |
| Hari/Tanggal | : | Senin, 21 Oktober 2019 |
| Prihal | : | Ujian Seminar Proposal/Skripsi |
| Judul | : | "Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Prespektif Hukum Ketatanegaraan Islam (Studi Kasus di KPU Gowa)" |
- Menimbang** :
- Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Proposal Penelitian/Skripsi;
 - Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji Seminar Proposal Penelitian/Skripsi
 - Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1996 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 - Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :
- Portama** :
- Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Proposal/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- | | | |
|------------|---|--|
| Ketua | : | Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag. |
| Sekretaris | : | Dr. Kurniati, M.H.I. |
| Penguji I | : | Dr. Nila Sastrawati, M.Si. |
| Penguji II | : | Dr. Hj. Rahmiati, M.Pd. |
| Pelaksana | : | 1. Baharuddin, S.Ag. M.Hum
2. Nursyamsi, S.T. |
- Kedua** :
- Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Proposal/Skripsi
- Ketiga** :
- Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2019;
- Keempat** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Samata Gowa
Pada tanggal 15 Oktober 2019
Dekan
MUAMMAR MUHAMMAD BAKRY

Tembusan :
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : B-396 /SH.01/PP.00.9/10/2019
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL

Samata Gowa, 15 Oktober 2019

Kepada

- Yth.
1. Dr. H. Muammar Muhammad Bakty, Lc., M.Ag. (Ketua)
 2. Dr. Kurniati, M.H.I. (Sekertaris)
 3. Dr. Nila Sastrawati, M.Si. (Penguji I)
 4. Dr. Hj. Rahmiati, M.Pd. (Penguji II)
 5. Prof. Dr. H. Gabri Samin, M.Ag. (Pembimbing I)
 6. Dr. Hj. Halimah B, M.Ag. (Pembimbing II)
 7. Pelaksana

Di

Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Proposal/Skripsi atas nama

Nama : Islarniah Ilyas
Nim : 10100115100
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasa Syar'iyah)

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/i pada Ujian Seminar Proposal/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 21 Oktober 2019
Waktu : Pukul 09.00-10.00 Wita
Tempat : Ruang Jurusan HTN

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Muhammad Bakry



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong – Gowa, Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 747 Tahun 2020

TENTANG

PANITIA, PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI
TAHUN 2020

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan
Nama : Islamiah Ilyas
NIM : 10200115100
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Hari/Tanggal : Rabu, 16 September 2020
Pihak : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Judul : "Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum
Prospektif Hukum Ketatanegaraan Islam (Studi Kasus Di Kpu Gowa)"
- Meringkat** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**
Pertama : Memberi Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag
Sekretaris : Dr. Kurniati, M.H.I.
Penguji I : Dr. Nila Sastrawati, M.Si.
Penguji II : Dr. Hj. Rahmali, S.Pd., M.Pd.
Pelaksana : 1. Muh. Amzar, S.Ag
2. Basir
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2020;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditandatangani di : Romang Polong
Pada tanggal : 09 September 2020

MUAMMAR MUHAMMAD BAKRY

Tembusan :
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Romang Polong;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong – Gowa, Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : B- 2911 /SH.O1/PP.00.9/09/2020
Sifat : Penting
Hal : Undangan Ujian Seminar Hasil

Romang Polong, 09 September 2020

Kepada Yth :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Dr. H Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag | (Ketua) |
| 2. Dr. Kurniati, M.H.I. | (Sekretaris) |
| 3. Dr. Nila Sastrawati, M.Si. | (Penguji I) |
| 4. Dr. Hj. Rahmiati, S.Pd., M.Pd. | (Penguji II) |
| 5. Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag | (Pembimbing I) |
| 6. Dr. Hj. Halimah B, M.Ag | (Pembimbing II) |
| 7. Pelaksana | |

Di

Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

Nama : Istamiah Ilyas
NIM : 10200115100
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'yyah)

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang kepada Bapak/Ibu, Saudara/i untuk menghadiri Ujian Seminar Hasil/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 16 September 2020
Waktu : Pukul 09.00- Selesai
Pelaksanaan : Online/ Daring

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



MUAMMAR MUHAMMAD BAKRY

Tembusan:
- Rektor UIN Alauddin Makassar di Romang Polong



Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 873 Tahun 2020
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSITAHUN 2020

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan : Islamiyah Ilyas
: N I M : 10200115100
: Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syari'yyah)
: Hari/Tanggal : Selasa, 17 November 2020
: Perihal : Ujian Munaqasyah /Skripsi
: Judul : "Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Tatanegaraan Islam (Studi Kasus Di KPU Gowa)".

Mengingat : b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
5. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Jo Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Dr. H. Muammar Muhammaad Bakry, Lc., M.Ag.
Sekretaris : Dr. Marilang, S.H., M.H.
Penguji I : Dr. Nila Sastrawati, M.Si.
Penguji II : Dr. Hj. Rahmiati, M.Pd.
Pelaksana : Dra. Hj. Wahidah Rahim, M.M.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditebitkannya Surat Keputusan ini dibeban kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2020;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Romang Polong
Pada tanggal : 13 November 2020



Muammar Muhammad Bakry

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Campus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : B – 678 /SH.01/PP.00.9/11/2020 Romang Polong 13 November 2020
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : UNDANGAN MUNAQASYAH

Kepada

Yth.	1. Dr. H. Muammar Muh. Bakry, Lc., M.Ag.	(Ketua)
	2. Dr. Marilang, S.H., M.H.	(Sekertaris)
	3. Dr. Nila Sastrawati, M.Si.	(Penguji I)
	4. Dr. Hj. Rahmiati, M.Pd.	(Penguji II)
	5. Prof. Dr Sabri Samin, M.Ag.	(Pembimbing I)
	6. Dr. Hj. Halimah B, M.Ag	(Pembimbing II)
	7. Pelaksana	

di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah atas nama :

Nama	: Islamiyah Ilyas
N I M	: 10200115100
Jurusan	: Hukum Tatanegara (Siyasah Syari'yyah)

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/i) pada Ujian Munaqasyah, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal	: Selasa, 17 November 2020
Buka Sidang	: 08.00 WITA
Pelaksanaan Online	

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam



Muammar Muhammad Bakry